

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA
MODAL SERTA PENGARUHNYA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
DI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

**Karya Tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**

Jurusan Akuntansi

Disusun Oleh :

DENI IRAWAN

NIM : 1A.08.1220

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

BANK BPD JATENG

SEMARANG

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA
MODAL SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI JAWA TENGAH**

Disusun oleh :

DENI IRAWAN

NIM : 1A.08.1220

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

STIE Bank BPD Jateng

Semarang, 30 Oktober 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Sri Imaningati, SE, MSi.Akt

NIDN : 0611127001

Usman Dahlan, S.Si, MT

NIDN: 0624047001

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA
MODAL SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI JAWA TENGAH**

Disusun Oleh :

DENI IRAWAN

NIM : 1A.08.1220

Dinyatakan diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi STIE Bank BPD
Jateng pada tanggal 30 Oktober 2012

TIM PENGUJI

1. Yohana Kus Suparwati, SE, Msi
NIDN : 0611056902
2. Mekani Vestari, SE, Msi, Akt
NIDN : 0016077401
3. Sri Imaningati, SE, Msi, Akt
NIDN : 0611127001

TANDA TANGAN

.....
.....
.....

Mengesahkan,

Ketua STIE Bank BPD Jateng

DR. H. Djoko Sudantoko, SSos, MM

NIDN. 0607084501

ABSTRAK

Masih adanya belanja modal pemerintah kabupaten / kota yang digunakan tidak sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Dimana semestinya tingkat pertumbuhan ekonomi seiring sejalan dengan belanja modal yang digunakan oleh pemerintah kabupaten / kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah yang bersumber dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006-2010. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan populasi seluruh kabupaten / kota di Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi untuk tahap pertama dan tahap kedua. Dari regresi tahap pertama diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Dari regresi tahap kedua diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal (BM) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Dari analisis jalur diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) melalui Belanja Modal (BM). Dari penelitian diperoleh hasil R^2 pada tahap pertama sebesar 39,4% dan 34,9% untuk model tahap kedua.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

Still a capital expenditure of district / cities used does not match the level of regional economic growth. Where should the level of economic growth go hand in hand with capital expenditures used by the district / cities governments. This research to identify the effect of the general allocation fund, revenue, and a special allocation of funds to economic growth, with capital expenditure as an intervening variable. The sample used in this research were 35 districts / cities in Central Java source from the realization reports Budget (APBD) of year 2006-2010. The method of data collection used in this research is a method of census the population of all districts / cities in Central Java. The method of analysis used in this research is the regression analysis for the first stage and second stage. From the first stage regression result that the General Allocation Fund (DAU), Regional Own Revenue (PAD), and Special Allocation Fund (DAK) positive effect on capital expenditures (BM). From the second stage regression result that the General Allocation Fund (DAU), Regional Own Revenue (PAD), Special Allocation Fund (DAK) and Capital Expenditure (BM) positive effect on economic growth (PE). From the analysis of the results obtained by the path that the General Allocation Fund (DAU), Regional Own Revenue (PAD), and Special Allocation Fund (DAK) effect on Economic Growth (PE) through Capital Expenditure (BM). From the research results of R^2 in the first stage of 39.4% and 34.9% for the second stage of the model.

Keywords : General Allocation Fund, Regional Own Revenue, Special Allocation Fund, Expense Capital and Growth of Economics

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah saya,

Nama : Deni Irawan

NIM : 1A.08.1220

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul
“PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA
TENGAH”

telah saya susun dengan sebenar-benarnya dengan memperhatikan kaidah akademik dan menjunjung tinggi hak atas karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi maupun unsur kecurangan lainnya pada skripsi yang telah saya buat tersebut, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan saya siap menerima segala konsekuensi yang ditimbulkannya termasuk pencabutan gelar kesarjanaaan yang telah diberikan kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, 30 Oktober 2012

Tdd



Deni Irawan

MOTTO

- ☞ **Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah berkerja keras (untuk urusan yang lain).**
Qs. Al Insyirah : 6 &7.
- ☞ **Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah niscaya dia akan melihat balasannya.**
Qs. Al Zalzalah : 7.
- ☞ **Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan diri kita.**
Qs. Al- Qur'annurkarim.
- ☞ **Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah SWT untuk berkehendak (Man Jadda wa Jadda)**
- ☞ **Harapan bukanlah keyakinan bahwa sesuatu akan berubah baik, melainkan kepastian bahwa sesuatu masuk akal, terlepas dari bagaimana ternyata hasilnya.**
Vaclev Havel (Presiden Cekoslovakia 1989-1992).
- ☞ **Formula terpenting untuk keberhasilan adalah cara kita berinteraksi dengan masyarakat.**
Theodore Rossevelt (Presiden Amerika Serikat ke 26).
- ☞ **Jika enggan mengambil resiko, kita takkan pernah kalah tapi juga takkan pernah menang.**
Richard Nixon (Presiden Amerika Serikat ke 37).
- ☞ **Jangan pernah menya-nyiakan waktu, karena itu sama saja dengan membuang kesempatan.**
William Shakespeare (Sastrawan Inggris).
- ☞ **Punya otak yang cemerlang saja tidak cukup, yang terpenting adalah bagaimana menggunakan kecerdasan itu dengan baik.**
- ☞ **Mereka yang menyambut tantangan, adalah mereka yang memberi ruang pada impian tuk menjadi kenyataan.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir dengan judul : “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah”.

Maksud dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan gelar sarjana Program Strata 1 (S1) pada STIE Bank BPD Jateng Semarang.

Tak lupa penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, hingga selesainya pembuatan skripsi. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Djoko Sudantoko, S.Sos, MM. selaku Ketua STIE Bank BPD Jateng Semarang.
2. Ibu Nur Anissa, SE, MSi, Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Sri Imaningati, SE, Msi, Akt. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan meluangkan waktu, tenaga dan dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Usman Dahlan, S.Si, MT. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus selaku dosen wali yang telah membantu memberikan kritik, saran hingga akhir penyusunan skripsi ini serta telah banyak memberikan arahan dan petunjuk untuk segera menyelesaikan studi kuliah ini.
5. Segenap Dosen Pengajar STIE Bank BPD Jateng Semarang yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran berharga.
6. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan motivasi, semangat, dorongan dan doa hingga skripsi ini selesai.
7. Teman – teman saya Danar van Parikesit, Ahmad van suarez, Amad van albar, Thiyan van Stradlin YNWA, Wawan van Setiawan, Ian van Nugroho, Risky van Millo Prayudha, Aggus van Dmj, Ulin van nuha, Pursiditama van Nagilohamay, Yudi, TeBe, Zaly, Putu Galih, Lina, Layla, Fany, Igga, Fika,

Lilis, Cwie, Nunik, dan teman-teman 3C dan seluruh aktn 08 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan, dan dapat memberikan ilmu yang berharga. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Semarang, 30 Oktober 2012

Penulis,

Deni Irawan

STIE BPD Jateng

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kerangka Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Teori Keagenan	13
2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	14
2.2.1. Pengertian APBD	14
2.2.2. Proses Penyusunan APBD	15
2.2.3. Asas Umum dan Struktur APBD	16
2.3. Pertumbuhan Ekonomi	17

2.4. Pendapatan Asli Daerah	18
2.5. Dana Alokasi Khusus	21
2.6. Dana Alokasi Umum	23
2.7. Belanja Modal	23
2.8. Pengembangan Hipotesis	26
2.8.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal	26
2.8.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal	27
2.8.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal	29
2.8.4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	30
2.9. Model Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Definisi Konsep	34
3.1.1. Variabel Independen	34
3.1.2. Variabel Dependen	35
3.1.3. Variabel Intervening	36
3.2. Definisi Operasional	36
3.2.1. Variabel Independen	37
3.2.2. Variabel Dependen	40
3.2.3. Variabel Intervening	41
3.3. Populasi dan Sampel	42
3.3.1. Populasi	42
3.3.2. Sampel	42
3.4. Metode Pengumpulan Data	42
3.5. Metode Analisis Data	43
3.5.1. Statistik Deskriptif	43
3.5.2. Analisis Regresi Linier Berganda	44
3.6. Uji Asumsi Klasik	45

3.6.1. Uji Normalitas	45
3.6.2. Uji Heteroskedasitas	46
3.6.3. Uji Multikolinieritas	47
3.7. Uji Kebaikan Model	47
3.7.1. Koefisien Determinasi (<i>adjusted R</i> ²)	47
3.7.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	48
3.7.3. Uji Signifikan Parameter individual (Uji Hipotesis)	49
3.8. Pengujian Intervening	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.1.1. Sampel Penelitian	52
4.1.2. Statistik Deskriptif	52
4.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	53
4.1.2.2. Belanja Modal	53
4.1.2.3. Pendapatan Asli Daerah	54
4.1.2.4. Dana Alokasi Umum	56
4.1.2.5. Dana Alokasi Khusus	58
4.2. Hasil Analisis	60
4.2.1. Analisis Regresi Linier Berganda	60
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	62
4.2.2.1. Uji Normalitas	62
4.2.2.2. Uji Heteroskedastisitas	64
4.2.2.3. Uji Multikolinieritas	67
4.2.3. Uji Kebaikan Model	68
4.2.3.1. Uji Koefisien Determinasi (<i>R</i> ²)	68
4.2.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statiatik F)	69
4.2.3.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Hipotesis)	70
4.2.4. Uji Intervening	73
4.3. Pembahasan	75

BAB V	PENUTUP	81
	5.1. Kesimpulan.....	81
	5.2. Keterbatasan	82
	5.3. Saran	82
	5.4. Implikasi Manajerial	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

STIE BPD Jateng

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2007-2009	2
Tabel 1.2 Realisasi Pengeluaran (Belanja Modal) Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2007-2009	4
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	53
Tabel 4.2 Analisis Regresi Linier Berganda	61
Tabel 4.3 Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov Test</i>	64
Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas Glesjer 1	65
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas Glesjer 2	66
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas	67
Tabel 4.7 Uji Keباikan Model dengan Koefisien Determinasi	68
Tabel 4.8 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	69
Tabel 4.9 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Hipotesis)	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Penelitian	12
Gambar 2.1 Model Penelitian.....	33
Gambar 4.1 Grafik Pola Hubungan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi	54
Gambar 4.2 Grafik Pola Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi	55
Gambar 4.3 Grafik Pola Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal	56
Gambar 4.4 Grafik Pola Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	57
Gambar 4.5 Grafik Pola Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal	58
Gambar 4.6 Grafik Pola Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	59
Gambar 4.7 Grafik Pola Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal	60
Gambar 4.8 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Normal Probability Plot ...	63
Gambar 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot model 1	67
Gambar 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot model 2	68
Gambar 4.11 Hasil Uji Intervening	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A Daftar Sampel Penelitian
- Lampiran B Data Dana Alokasi Umum
- Lampiran C Data Pendapatan Asli Daerah
- Lampiran D Data Dana Alokasi Khusus
- Lampiran E Data Belanja Modal
- Lampiran F Data Pertumbuhan Ekonomi
- Lampiran G Output Hasil Penelitian

STIE BPD Jateng

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dengan begitu dapat dipahami bahwa dari definisi tersebut menekankan pada tiga aspek yakni proses, output perkapita, dan jangka panjang. Artinya bahwa perekonomian itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adanya kenaikan output perkapita berarti ada dua sisi yang penting untuk diketahui yaitu output dan jumlah penduduknya (Boediono (1985) dalam Darwanto dan Yulia Yutikasari, 2007). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Adanya beberapa daerah yang tergolong pertumbuhan ekonominya rendah dikarenakan sedikitnya sumber daya alam yang dimiliki. Sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah, selain pola investasi dan perkembangan sarana dan prasarana transportasi (Zaris (1987:86) dalam Wiratno Bagus Suryono, 2008).

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Wiratno Bagus Suryono, 2008).

Tabel:1.1

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah
tahun anggaran 2007-2009

NO	DAERAH	TAHUN		
		2007	2008	2009
1	Kab.Banjarnegara	5.01 %	4.97 %	5.11 %
2	Kab.Banyumas	5.30 %	5.37 %	5.49 %
3	Kab.Batang	3.67 %	3.67 %	3.72 %
4	Kab.Blora	3.95 %	5.62 %	5.08 %
5	Kab.Boyolali	4.09 %	4.03 %	5.16 %
6	Kab.Brebes	4.79 %	4.81 %	4.99 %
7	Kab.Cilacap	4.87 %	4.92 %	5.25 %
8	Kab.Demak	4.15 %	4.11 %	4.08 %
9	Kab.Grobogan	4.37 %	5.32 %	5.03 %
10	Kab.Jepara	4.74 %	4.49 %	5.02 %
11	Kab.Karanganyar	5.74 %	5.29 %	5.54 %
12	Kab.Kebumen	4.52 %	5.80 %	3.94 %
13	Kab.Kendal	4.32 %	4.23 %	5.58 %
14	Kab.Klaten	3.31 %	3.92 %	4.24 %
15	Kab.Kudus	3.03 %	3.92 %	3.95 %
16	Kab.Magelang	5.21 %	4.15 %	5.56 %
17	Kab.Pati	5.19 %	4.94 %	4.69 %
18	Kab.Pekalongan	4.59 %	4.78 %	4.30 %
19	Kab.Pemalang	4.47 %	4.99 %	4.78 %
20	Kab.Purbalingga	6.19 %	5.30 %	5.89 %
21	Kab.Purworejo	6.08 %	5.61 %	4.96 %
22	Kab.Rembang	3.81 %	4.67 %	4.46 %
23	Kab.Semarang	4.72 %	4.26 %	4.37 %
24	Kab.Sragen	5.73 %	5.69 %	6.01 %
25	Kab.Sukoharjo	5.11 %	4.84 %	4.76 %
26	Kab.Tegal	5.59 %	5.31 %	5.29 %
27	Kab.Temanggung	4.03 %	3.54 %	4.09 %
28	Kab.Wonogiri	5.07 %	4.26 %	4.73 %
29	Kab.Wonosobo	3.58 %	3.69 %	4.02 %
30	Kota Magelang	5.17 %	5.04 %	5.11 %
31	Kota Pekalongan	3.80 %	3.72 %	4.78 %
32	Kota Salatiga	5.39 %	4.98 %	4.48 %
33	Kota Semarang	5.98 %	5.59 %	5.34 %
34	Kota Surakarta	5.82 %	5.69 %	5.90 %
35	Kota Tegal	5.21 %	5.15 %	5.02 %

Sumber: BPS Jawa Tengah

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2008 lebih dari separuh daerah kabupaten dan kota mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2009 tingkat pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2008, namun juga ada beberapa daerah yang mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Abdul Halim (2004) dalam Baihaqi dan Husnul Khotimah, 2009). Jenis-jenis belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan, aset tak berwujud, gedung dan bangunan dan lain-lain. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah (David Harianto dan Priyo Hari Adi, 2007).

Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, serta investasi pemerintah yang meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya, dimana hal tersebut merupakan syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi dengan tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Besarnya belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentu sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah tersebut (Anggiat Situngkir dan John Sihar Manurung, 2009). Menurut Saragih (2003) dalam Darwanto dan Yulia Yutikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yulia Yutikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program

layanan publik. Kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa pengalokasian belanja modal untuk kepentingan publik sangatlah penting.

Tabel:1.2

Realisasi pengeluaran (Belanja Modal) Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2007-2009

NO	DAERAH	TAHUN		
		2007	2008	2009
1	Kab.Banjarnegara	Rp 118,008,298,000	Rp 138,287,451,000	Rp 102,463,952,000
2	Kab.Banyumas	Rp 115,336,370,000	Rp 154,241,121,000	Rp 184,008,904,000
3	Kab.Batang	Rp 115,671,247,000	Rp 119,144,413,000	Rp 94,858,839,000
4	Kab.Blora	Rp 131,884,348,000	Rp 141,454,932,000	Rp 129,823,827,000
5	Kab.Boyolali	Rp 111,554,453,000	Rp 124,533,005,000	Rp 136,724,606,000
6	Kab.Brebes	Rp 190,944,176,000	Rp 195,181,836,000	Rp 165,544,493,000
7	Kab.Cilacap	Rp 255,404,254,000	Rp 277,402,484,000	Rp 120,851,000,000
8	Kab.Demak	Rp 155,229,455,000	Rp 112,693,549,000	Rp 171,127,146,000
9	Kab.Grobogan	Rp 133,974,534,000	Rp 183,632,379,000	Rp 116,559,974,000
10	Kab.Jepara	Rp 179,923,128,000	Rp 156,369,601,000	Rp 128,008,626,000
11	Kab.Karanganyar	Rp 103,093,636,000	Rp 149,886,536,000	Rp 100,288,589,000
12	Kab.Kebumen	Rp 242,725,232,000	Rp 160,041,447,000	Rp 174,751,552,000
13	Kab.Kendal	Rp 132,583,732,000	Rp 116,591,446,000	Rp 96,243,411,000
14	Kab.Klaten	Rp 148,775,964,000	Rp 144,478,227,000	Rp 75,194,885,000
15	Kab.Kudus	Rp 118,242,571,000	Rp 165,755,905,000	Rp 228,398,616,000
16	Kab.Magelang	Rp 135,168,204,000	Rp 121,809,610,000	Rp 117,793,994,000
17	Kab.Pati	Rp 172,431,765,000	Rp 162,413,282,000	Rp 155,703,754,000
18	Kab.Pekalongan	Rp 99,435,572,000	Rp 96,564,162,000	Rp 102,119,818,000
19	Kab.Pemalang	Rp 156,664,560,000	Rp 135,099,803,000	Rp 81,212,592,000
20	Kab.Purbalingga	Rp 102,003,312,000	Rp 180,386,711,000	Rp 134,847,923,000
21	Kab.Purworejo	Rp 109,596,268,000	Rp 106,615,079,000	Rp 93,299,528,000
22	Kab.Rembang	Rp 150,366,563,000	Rp 123,254,537,000	Rp 88,623,219,000
23	Kab.Semarang	Rp 145,546,235,000	Rp 164,116,607,000	Rp 124,183,050,000
24	Kab.Sragen	Rp 156,501,870,000	Rp 170,554,065,000	Rp 97,170,742,000
25	Kab.Sukoharjo	Rp 96,790,104,000	Rp 112,595,425,000	Rp 92,436,727,000
26	Kab.Tegal	Rp 173,515,857,000	Rp 191,884,274,000	Rp 171,083,434,000
27	Kab.Temanggung	Rp 112,790,951,000	Rp 119,137,750,000	Rp 88,563,405,000
28	Kab.Wonogiri	Rp 94,500,030,000	Rp 144,349,169,000	Rp 130,187,612,000
29	Kab.Wonosobo	Rp 126,455,780,000	Rp 160,949,520,000	Rp 132,165,684,000
30	Kota Magelang	Rp 69,555,818,000	Rp 72,451,726,000	Rp 95,838,701,000
31	Kota Pekalongan	Rp 69,192,445,000	Rp 104,148,893,000	Rp 70,555,137,000
32	Kota Salatiga	Rp 23,660,000,000	Rp 126,481,274,000	Rp 142,756,936,000
33	Kota Semarang	Rp 193,078,363,000	Rp 155,065,661,000	Rp 274,529,979,000
34	Kota Surakarta	Rp 152,340,330,000	Rp 163,614,676,000	Rp 190,399,019,000
35	Kota Tegal	Rp 103,552,840,000	Rp 94,109,843,000	Rp 128,880,456,000

Sumber: BPS Jawa Tengah

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 belanja modal daerah kabupaten dan kota lebih dari separuh mengalami peningkatan. Dibanding tahun 2008 pada tahun 2009 belanja modal daerah kabupaten dan kota tidak mengalami kenaikan seperti tahun 2008, ada beberapa daerah kabupaten dan kota yang mengalami penurunan yang cukup drastis.

Menurut Lin dan Liu (2000) dalam David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) menyatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja pembangunan daerah merupakan faktor yang menentukan bagi pertumbuhan ekonomi daerah (Priyo Hari Adi, 2007). Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi (1997) dalam Priyo Hari Adi, 2006). Namun pada kenyataannya yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan belanja modal tidak selalu diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dapat dilihat dari besar kecilnya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah di beberapa daerah seperti pada tabel 1.1 yang mana tidak sejalan dengan besar kecilnya belanja modal yang dikeluarkan di beberapa daerah seperti pada tabel 1.2

Dalam penelitian yang dilakukan Dina Apriana dan Rudy Suryanto (2010) menunjukkan bahwa belanja modal kurang berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya untuk pembangunan daerah. Dimana dana tersebut diperoleh pemerintah daerah diantaranya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% maka dibutuhkanlah bantuan dari pemerintah pusat yang kemudian diantaranya berupa DAU dan DAK untuk menopang hal tersebut (Kuncoro (2007) dalam Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi, 2009).

DAU merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Namun di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU daripada PAD (Sidik et al, (2002) dalam Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi, 2009). Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar (Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi, 2009).

Dalam penelitian Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi (2009) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa DAU cukup berarti bagi kelangsungan belanja modal pemerintah daerah. Namun dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal (Abdul Halim dan Syukriy Abdullah, (2003) dalam Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi, 2009).

Menurut UU No.55 tahun 2005 PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan

kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar (2004) dalam Mutiara Maimunah dan Rusdi Akbar, 2008). Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Dalam penelitian yang dilakukan Anggiat Situngkir dan John Sihar Manurung (2009) menunjukkan bahwa PAD mempengaruhi belanja modal suatu daerah. Hal tersebut berarti bahwa PAD merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang sangat penting, guna mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat memberikan bantuan dana kepada pemerintah daerah selain DAU ialah DAK yang mana berdasarkan UU No.55 tahun 2005, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Dengan adanya alokasi DAK maka kebutuhan belanja modal disuatu daerah dapat terpenuhi sehingga aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah bertambah dan dapat meningkatkan pelayanan publik seperti bagaimana tujuan DAK ([Http://www.depkeu.djpk.go.id/.](http://www.depkeu.djpk.go.id/)).

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Anggiat Situngkir dan John Sihar Manurung (2009) menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa selain berperan dalam menunjang penerimaan daerah, DAK juga berperan cukup penting dalam meningkatkan kapasitas belanja modal pemda dengan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Usman dkk, 2008). Adanya peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer pemerintah pusat setiap tahunnya

diharapkan dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi, 2009).

Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan daerah yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Priyo Hari Adi (2005) dalam Dina Apriana dan Rudy Suryanto (2010) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nanga (2005) dalam Dina Apriana dan Rudy Suryanto (2010) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002 dalam Dina Apriana dan Rudy Suryanto, 2010).

Brata (2004) dalam David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan bagian sumbangan dan bantuan termasuk DAU & DAK. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Tambunan, 2006 dalam David Harianto dan Priyo Hari Adi, 2007). DAU & DAK merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk menutupi kekurangan PAD dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut seperti menambah lapangan kerja, menarik minat masyarakat untuk berinvestasi sehingga tingkat kemajuan daerah meningkat dan kebutuhan masyarakat dapat tercukupi (Yulian Rinawaty Taaha, Nursini dan Agussalim 2008). Sehingga dengan adanya DAU dan DAK diharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dan kesenjangan pertumbuhan ekonomi dapat ditekan (David Harianto dan Priyo Hari Adi, 2007)

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa belanja modal merupakan bagian penting dalam upaya memajukan pembangunan daerah, yang mana belanja modal sendiri sumbernya diperoleh diantaranya dari DAU, PAD dan DAK. Jika belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi maka setiap ada peningkatan belanja modal seharusnya diiringi juga dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya. Bila setiap ada peningkatan belanja modal namun tidak diimbangi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemungkinan yang terjadi adalah pemerintah daerah belum menggunakan dana belanja modal tersebut secara efektif dan efisien sehingga kurang atau tidak nampak dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain memunculkan kemungkinan tindakan penyalahgunaan belanja modal.

Dari uraian di atas maka perlu untuk dilaksanakannya penelitian tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan dasar untuk menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah tentang pemanfaatan belanja modal yang dapat berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang menginvestigasi pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang dilakukan oleh David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007), Priyo Hari Adi (2006), dan Dina Apriana dan Rudy Suryanto (2010). Dalam penelitian David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) DAU disertakan sebagai prediktor dari pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada penelitian Priyo Hari Adi (2006) PAD juga digunakan sebagai prediktor dari pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Dina Apriana dan Rudy Suryanto (2010) menggunakan kemendirian daerah sebagai pemediasi dari belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak pada penelitian Dina Apriana dan Rudy Suryanto (2010).

Sejumlah penelitian terdahulu menggunakan DAU, PAD, dan DAK sebagai prediktor dari belanja modal. Seperti pada penelitian Anggiat Situngkir dan John Sihar Manurung (2009), Usman dkk., (2008), serta Darwanto dan Yulia Yutikasari (2007). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa DAU, PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Dengan demikian, studi mengenai pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini akan merujuk pada model penelitian David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007), dimana belanja modal diprediksi menggunakan DAU, PAD, dan DAK sebagaimana penelitian Anggiat Situngkir dan John Sihar Manurung (2009).

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan bahwa pada sejumlah daerah yang mengalami peningkatan belanja modal tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal ?
- b. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal ?
- c. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal ?
- d. Apakah Belanja modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Jawa Tengah
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Jawa Tengah
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Jawa Tengah
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintahan kota/kabupaten di Jawa Tengah dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai belanja modal untuk pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten di Jawa Tengah,

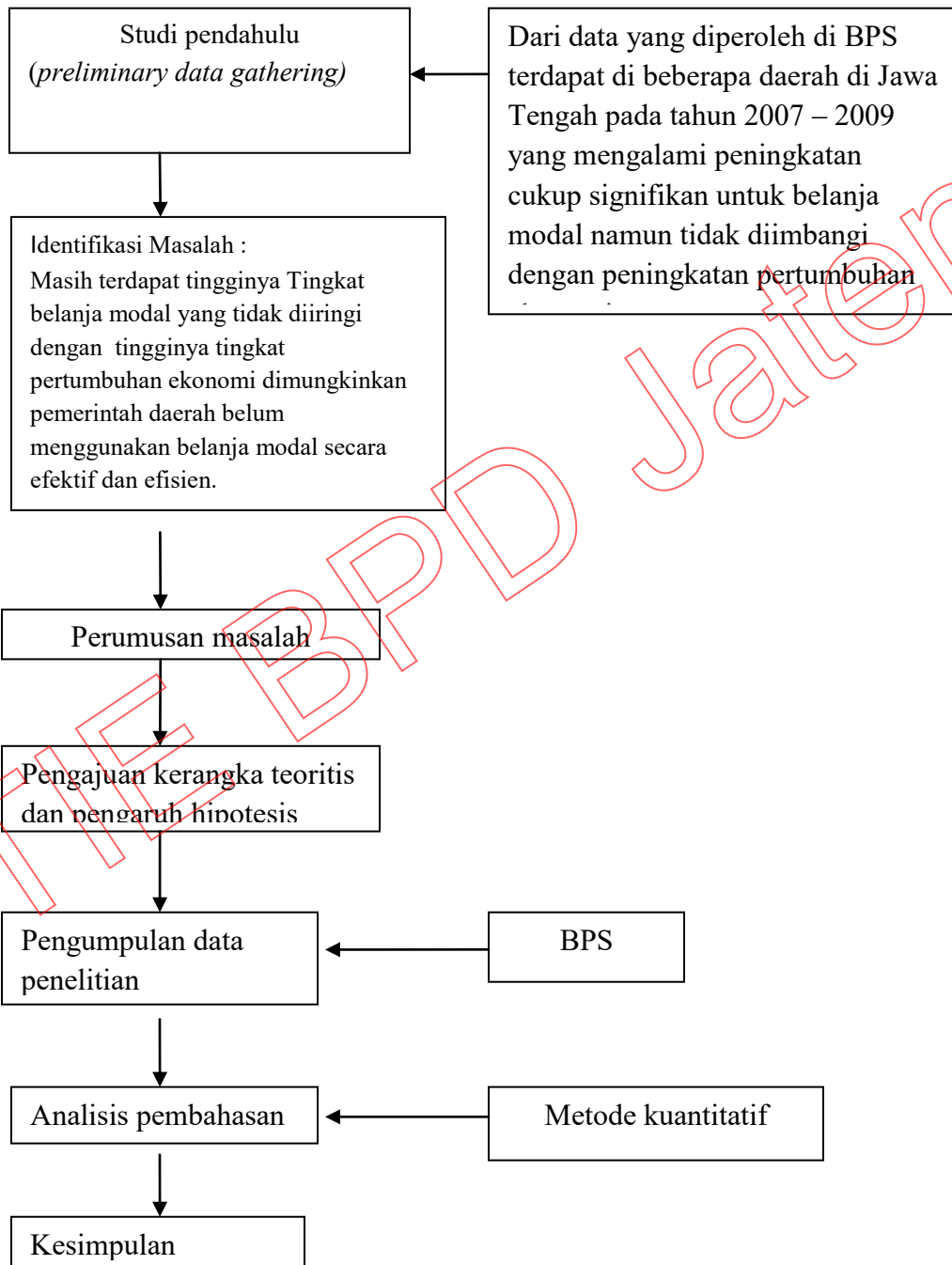
1.4.2.2 Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya dan menjadi masukan dalam penelitian dibidang yang sama dimasa mendatang.

1.5 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini berisi bagan yang menjelaskan proses atau alur penelitian yang dilakukan, dimulai dari studi pendahuluan hingga penarikan kesimpulan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hendriksen dan Van Breda (2002) dalam Darwanto dan Yulia Yutikasari (2007) hal yang mendasari konsep teori keagenan muncul dari perluasan dari satu individu pelaku ekonomi informasi menjadi dua individu. Salah satu individu ini menjadi *agent* untuk yang lain yang disebut *principal*. *Agent* membuat kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi *principal*, *principal* membuat kontrak untuk memberi imbalan pada *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* ke *agent*. Analoginya mungkin seperti antara DPRD dan pemerintah daerah.

Para pemilik disebut evaluator informasi dan agen-agen mereka disebut pengambil keputusan (Hendriksen dan Van Breda, 2002 dalam Darwanto dan Yulia Yutikasari, 2007). Hubungan agensi dikatakan terjadi ketika terdapat sebuah kontrak antara seseorang (atau beberapa orang), seorang prinsipal dan seseorang (atau beberapa orang) lain, seorang agen untuk melakukan pelayanan bagi kepentingan prinsipal mencakup sebuah pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan mementingkan diri sendiri yaitu, untuk memaksimalkan utilitas subjektif mereka, tetapi juga menyadari kepentingan umum mereka.

Ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh moral hazard (kekacauan moral) (Hendriksen dan Van Breda, 2002 dalam Darwanto dan Yulia Yutikasari, 2007).

Asimetri informasi antara pemerintah daerah (*agent*) dengan DPRD (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*). Adanya asimetri informasi akan mendorong pemerintah daerah untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja pemerintah daerah (Abdul Halim, 2001 dalam Darwanto dan Yulia Yutikasari, 2007). Efek dari asimetri informasi dan pemisahan “kepemilikan” dan “pengelolaan” ini adalah munculnya *agency problems*. Menurut Arrow (1985) dalam Darwanto dan Yulia Yutikasari (2007), ada dua macam *agency problems*, yaitu:

1. Moral hazard

Yaitu permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal dalam kontrak kerja.

2. Adverse selection

Yaitu keadaan di mana *principal* tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil agen benar-benar didasarkan atas informasi yang diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.1 Pengertian APBD

Menurut UU No. 32/2004, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Adapun dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan UU No. 32/2004 antara lain :

1. Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.2 Proses Penyusunan APBD

Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 yang menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip-prinsip : partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektivitas anggaran.

Dalam pasal 17 dan 18 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD

tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.2.3 Asas Umum dan Struktur APBD

Menurut Pasal 15 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, azas umum APBD yaitu:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah,
2. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara,
3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi,
4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sedangkan Menurut Pasal 22 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Struktur APBD yaitu:

1. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari : pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah,
2. Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

3. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Dina Apriana dan Rudy Suryanto, 2010). Kalau PDB (Produk Domestik Bruto) berkaitan dengan penyediaan informasi/data ekonomi makro di tingkat nasional maka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan perluasan di tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah). Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, dan pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, kemajuan teknologi.

Simon Kuznet (1994) dalam Yulian Rinawaty Taaha, Nursini, dan Agussalim (2010) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan”.

Pengertian yang lain, pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula

kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan (Sadono Sukirno ,1985).

2.4 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan asli daerah menurut UU No.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah diatur lebih lanjut oleh undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang disempurnakan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari undang-undang nomor 18 tahun 1997 (Dina Apriana & Rudy Suryanto, 2010).

Menurut Permendagri No. 13/2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- 1) Hasil pajak daerah,
- 2) Hasil retribusi daerah,
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat,
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan mencakup : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas

5) keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU No. 28/2009).

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam Pasal 108 UU No. 28/2009 disebutkan Objek Retribusi terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Adapun penjelasannya meliputi :

- a) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
- Retribusi Pelayanan Kesehatan,
 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,

- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
 - Retribusi Pelayanan Pasar,
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
 - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,
 - Retribusi Biaya Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus,
 - Retribusi Pengolahan Limbah Cair,
 - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,
 - Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan
 - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: (1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan secara optimal, dan/atau (2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
 - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan,
 - Retribusi Tempat Pelelangan,
 - Retribusi Terminal,
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir,
 - Retribusi Tempat Penginapan/Pasangrahan/Villa,
 - Retribusi Rumah Potong Hewan,
 - Retribusi Pelayanan Kepelabuhan,
 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,
 - Retribusi Penyeberangan di Air, dan
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan

d) pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Retribusi Izin Gangguan,
- Retribusi Izin Trayek, dan
- Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, dalam kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Dalam Pasal 7 UU No. 33/2004 disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

- a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

2.5 DANA ALOKASI KHUSUS

Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam website [Http://www.depkeu.djpk.go.id/](http://www.depkeu.djpk.go.id/). kebijakan DAK bertujuan :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai

kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.

2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktifitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus dibidang pertanian, kelautan dan perikanan serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastuktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi resiko bencana melalui kegiatan khusus dibidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus dibidang infrastuktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana didaerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus dibidang prasarana pemerintah.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran kementrian/lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

2.6 DANA ALOKASI UMUM

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 tahun 2004). Dana alokasi umum diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekeurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya. Dana alokasi umum bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana alokasi umum terdiri dari dana alokasi umum untuk daerah propinsi dan dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota. Dana alokasi umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besarnya dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi Dana alokasi umum untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota (Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi, 2009).

2.7 BELANJA MODAL

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Deddi Nordiawan, 2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni

peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun, untuk kasus pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli. Dengan kata lain cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai belanja modal yaitu :

- 1) Belanja Modal Tanah yaitu semua biaya yang diperlukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu jumlah biaya untuk pengadaan alat-alat dan mesin yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap untuk digunakan. Dalam jumlah biaya ini termasuk biaya untuk penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin dan diharapkan dapat meningkatkan nilai aktiva, serta seluruh biaya pendukung yang diperlukan.
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, termasuk dalam belanja ini adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan kegiatan pembangunan gedung yang prosentasenya mengikuti Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya untuk pembangunan gedung dan bangunan.
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu biaya untuk penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan sarana dan prasarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi/distribusi listrik dan jaringan

telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi/instalasi.

- 5) Belanja Modal Fisik Lainnya yaitu jumlah biaya yang digunakan untuk perolehan melalui pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik, yang termasuk dalam belanja modal non fisik ini yaitu kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan atau pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Menurut Abdul Halim dan Syukriy Abdullah (2001), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Robert Bland & Samuel Nunn, (1992) juga menyatakan hal senada, bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifikasi dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang.

Adha Dewi (2006) dan Syaiful (2008) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Kenaikan PAD dapat berpengaruh terhadap jumlah DAU yang ditransfer dari pemerintah pusat. Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dibeberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU daripada PAD (Sidik et.al, 2002).

Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar (Fhino Andrea Cristy dan Priyo Hari Adi, 2009).

Dalam penelitian Holtz-Eakin et.al (1994) menunjukkan adanya keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang dilakukan oleh dalam Abdul Halim dan Syukriy Abdullah (2001) menemukan bukti empiris bahwasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Penelitian Abdul Halim dan Syukriy Abdullah (2003), menunjukkan menunjukkan kecenderungan yang sama dimana daerah lebih mengandalkan penerimaan DAU daripada PAD untuk kepentingan pembiayaan daerah, Perilaku belanja daerah lebih ditentukan oleh besar kecilnya DAU daripada PAD. Kesit Bambang Prakosa (2004) serta David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) memberikan fakta empirik yang sama dimana DAU mempunyai pengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah.

Pergeseran komposisi belanja modal yang juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi (Muhammad Abrar, 2010). Dalam penelitian Priyo Hari Adi (2007) mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja modal yang dimanfaatkan untuk pembangunan. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dari berbagai pemamparan ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang dimanfaatkan dalam belanja modal memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut:

H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

2.8.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2005). Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasi potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto & Yulia Yutikasari, 2007).

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin

meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Peningkatan pemerintah daerah dalam belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah.

Sidik et.al (2002) dalam David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima. Tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemda harus lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi (David Harianto dan Priyo Hari Adi, 2007). Abdullah Halim dan Syukriy Abdullah (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Syukriy Abdullah, 2004 dalam Anggiat Situngkir dan Jhon Sihar Manurung, 2009). Wong (2004) menunjukkan adanya kontribusi positif PAD terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah melalui belanja modal. Belum memadainya PAD yang dimiliki oleh daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk berfikir kreatif. Investasi, salah satunya dengan melakukan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengundang

hadirnya investor. Dengan demikian diharapkan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah (Dina Apriana dan Rudy Suryanto, 2010). Kuncoro (2004) menemukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah melalui belanja modal berpengaruh positif terhadap pada pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis yang dikembangkan dari pemaparan diatas adalah sebagai berikut:

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

2.8.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Urusan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah daerah dengan pusat (UU No.33 tahun 2004).

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, yang merupakan bersumber dari APBN. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Selain berperan dalam menunjang penerimaan daerah, DAK juga berperan cukup penting dalam meningkatkan kapasitas belanja modal pemda dengan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Usman dkk, 2008). Dengan demikian diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Penelitian yang dilakukan Yulian Rinawaty Tahaa, Nursini dan Agussalim (2010) Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sementara Usman dkk (2008) menyatakan bahwa dana alokasi khusus merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Seperti dengan temuan Usman dkk (2008) Anggiat Situngkir dan John Sihar Manurung (2009) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja modal (pembangunan) lebih besar dari pengeluaran rutin maka kebijakan ekspansi anggaran daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Saranggih, 2003). Penelitian yang dilakukan Priyo Hari Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam tingkat pertumbuhan ekonomi daerah (David Harianto dan Priyo Hari Adi, 2007). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal yang mana dalam pengalokasian anggaran pengeluaran akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H3: Dana Alokasi Khusus Berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

2.8.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal

pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula (Darwanto & Yulia Yutikasari, 2007).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita (Boediono (1985) dalam Darwanto dan Yulia Yutikasari (2007)). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Prouk Domestik Regional Daerah/PDRB (Saragih, 2003;Kuncoro, 2004).

Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin & Liu, 2000;Mardiasmo, 2002;Wong, 2004).

Pada pasal 26 PP No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah bagian keempat tentang belanja daerah ayat 1 berbunyi “Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan propinsi atau kota/kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan“. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa “ Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial“. Pada hasil penelitian Dina Apriana & Rudy Suryanto (2010) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Temuan tersebut berbeda dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Priyo Hari Adi (2006), Wong (2004), dan Kuncoro (2004) serta David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) menemukan bahwa

pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Dilihat dari alokasi belanja modal yang turun setiap tahunnya, masih banyak daerah yang belum secara optimal menyediakan fasilitas umum yang memadai. Dari pemaparan diatas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

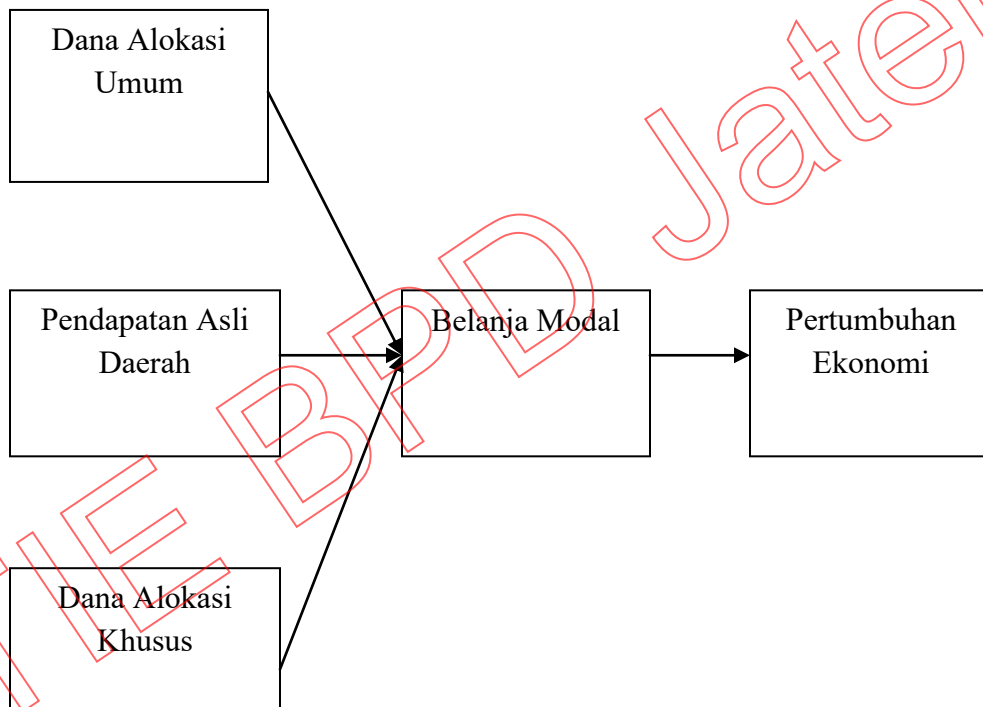
H4: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

STIE BPD Jateng

2.9 Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, gambar berikut merupakan model penelitian mengenai hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan variabel independen dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebagai variabel dependen melalui Belanja Modal (BM) sebagai variabel intervening.

Gambar 2.1
Model Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah suatu definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian sosial (Singa Rimbun dan Efendi, 1998).

3.1.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel yang lainnya (variabel dependen). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

a. Dana Alokasi Umum

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

b. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No.28 tahun 2009 yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum(BLU) daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga
4. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Wijaya Adi (2005), PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko,2002).

Dana alokasi khusus diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.

3.1.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (PE).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita diproksikan dengan Produk Domestik Regional Bruto per kapita (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Sedangkan menurut Dina Apriana dan Rudy Suryanto (2010), secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan

jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Simon Kuznet (1994) dalam Yulian Rinawaty Taaha, Nursini, dan Agussalim (2010) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan“.

3.1.3 Variabel Intervening

Variabel intervening adalah variabel antara atau mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal (BM).

Adha Dewi (2006) dan Syaiful (2008) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Darwanto dan Yulia Yutikasari (2007) belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset).

3.2 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengatur variabel, petunjuk pelaksanaan tentang cara mengukur variabel yang sama (Singa Rimbun dan Sofyan Effendi, 1998:23). Definisi Operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.2.1 Variabel Independen

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dihitung dengan formula sebagai berikut (UU No. 33/2004) :

$$\text{DAU} = \text{CF} + \text{AD}$$

Keterangan :

DAU= Dana Alokasi Umum (Rupiah)

CF = Celah Fiskal (Rupiah)

AD= Alokasi Dasar (Rupiah)

Dimana CF dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{CF} = \text{KbF} - \text{KpF}$$

$$\text{KbF} = \text{TPR}(\text{IP} + \text{IW} + \text{IPM} + \text{IKK}) + \text{IPDRB per kapita}$$

$$\text{KpF} = \text{PAD} + \text{Dana Bagi Hasil (PBB+BPHTB+PPH+SDA)}$$

Keterangan rumus KbF :

KbF = Kebutuhan Fiskal (Rupiah)

TPR = Total Pengeluaran Rata-rata (Rupiah)

IP = Indeks Jumlah Penduduk (Persen)

IW = Indeks Luas Wilayah (Persen)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (Persen)

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi (Persen)

IPDRB = Indeks PDRB per kapita (Rupiah)

Keterangan rumus KpF :

KpF = Kapasitas Fiskal (Rupiah)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

PBB = Pajak Bumi dan Bangunan (Rupiah)

BPHTB = Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Rupiah)

PPh = Pajak Penghasilan (Rupiah)

SDA = Sumber Daya Alam (Rupiah)

Parameter kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi. Semakin kecil nilai indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan konstruksi, dan nilai indeks PDRB per kapita, semakin baik tingkat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

Sedangkan AD (Alokasi Dasar) berdasarkan PP No. 55/2005 dapat dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya tunjangan beras dan tunjangan Pajak Penghasilan/PPh Pasal 21.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang terdiri dari HPD, RD, PLPD, dan LPS. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

HPD = Hasil Pajak Daerah (Rupiah)

RD = Retribusi Daerah (Rupiah)

PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (Rupiah)

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rupiah)

a. Dana Alokasi Khusus

Jumlah Dana Alokasi Khusus untuk tiap kabupaten/kota berasal dari Bobot DAK yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (UU No.55 tahun 2005) :

$$\text{Bobot DAK} = \text{Bobot Daerah} + \text{Bobot Teknis}$$

Dimana penentuan Bobot Daerah adalah dengan cara :

$$\text{Bobot Daerah} = \text{IFW} \times \text{IKK}$$

Keterangan;

Bobot DAK (Rupiah)

Bobot Daerah (Rupiah)

Bobot Teknis (Rupiah)

IFW = Indeks Fiskal dan Wilayah (Rupiah).

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi (Persen).

Sedangkan Bobot Teknis dihitung dengan rumus :

$$\text{Bobot Teknis} = IT \times IKK$$

Keterangan;

IT = Indeks Teknis (Rupiah).

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi (Persen).

Mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya per bidang maupun per daerah menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR (Usman dkk, 2008). Jadi untuk mengetahui besarnya Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing kabupaten/kota maka dapat dilihat dari pos Dana Perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

3.2.2 Variabel Dependen

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi akan diprosikan oleh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang dirumuskan sebagai berikut (Priyo Hari Adi, 2007; Kuncoro, 2004; Dina Apriana dan Rudy Suryanto, 2010) :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{(\text{PDRB}_{t-1})} \times 100\%$$

Keterangan :

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t (Rupiah)

$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t
(Rupiah)

3.2.3 Variabel Intervening

Belanja Modal

Adalah pengeluaran untuk memperoleh aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indikator ini dapat diukur dengan formulasi berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

Keterangan :

Belanja Modal (Rupiah)

Belanja Tanah (Rupiah)

Belanja Peralatan dan Mesin (Rupiah)

Belanja Gedung dan Bangunan (Rupiah)

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rupiah)

Belanja Aset Lainnya (Rupiah)

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005: 55). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2005: 55). Dari seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa pemerintah kabupaten dan kota untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling*. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002), metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menerbitkan Laporan Realisasi APBD berturut-turut per 31 Desember dari tahun 2006–2010.
- b. Memiliki data lengkap yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini dan secara konsisten. Data-data tersebut meliputi data PDRB, DAU, PAD, DAK dan Belanja Modal.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan yaitu mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek

penelitiannya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh antara lain dari :

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dengan cara melihat, mencatat, dan mengambil informasi yang terdapat dalam Laporan Realisasi APBD sesuai dengan kriteria kelengkapan data. Laporan Realisasi APBD dapat diperoleh dari perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Bahan-bahan dan data yang peneliti cari adalah berhubungan dengan pokok bahasan yaitu mengenai Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi. Disamping itu, situs Dirjen Perimbangan Keuangan (<http://www.djpk.depkeu.go.id/>) juga diakses melalui internet untuk menambah keakuratan data.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik yang dilakukan dengan membaca literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan dengan membaca jurnal, Undang Undang, Peraturan Pemerintah, maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 METODE ANALISIS DATA

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa tahap. Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif, menurut Imam Ghozali (2006), memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai data (Mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Standar deviasi, maksimum dan minimum menunjukkan analisis terhadap dispersi data.

3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, apabila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik-turunkan nilainya (Sugiyono, 2005). Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus: meminimalkan nilai penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data (Imam Ghazali, 2006).

Persamaan regresi dalam model ini terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Model regresi tahap pertama:

$$BM = \beta_1 DAU + \beta_2 PAD + \beta_3 DAK + e_1$$

dimana;

BM = Belanja Modal (Variabel Intervening)

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

PAD = Pendapatan Asli Daerah

$\beta_1, \beta_2, \beta_3 = Slope$ atau koefisien regresi atau intersep

$e_1 = Variance$ variabel Belanja Modal yang tidak dijelaskan oleh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus

2. Model regresi tahap kedua:

$$PE = \beta_1 DAU + \beta_2 PAD + \beta_3 DAK + \beta_4 BM + e_2$$

dimana;

PE = Pertumbuhan Ekonomi

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BM = Belanja Modal

β_4 = Slope atau koefisien regresi atau intersep

e_2 = Variance variabel Pertumbuhan Ekonomi yang tidak dijelaskan oleh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus serta Belanja Modal.

3.6. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang akan dianalisis. Hal ini dilakukan untuk memperoleh model analisis yang tepat untuk digunakan dalam penelitian sesuai dengan hipotesisnya. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi yang dihadapi terbebas dari gejala multikolinieritas, heterokedastisitas, dan data terdistribusi secara normal. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi :

3.6.1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak Imam Ghozali (2006). Model regresi yang baik adalah memiliki data berdistribusi normal. Untuk menguji apakah terdapat distribusi normal atau tidak dalam model regresi maka digunakan analisis grafik dan uji statistik.

1. Analisis grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat *normal probability plot*. Dasar pengambilannya adalah:

- Jika penyebaran data mengikuti garis normal, maka data berdistribusi normal.
- Jika penyebaran data tidak mengikuti garis normal, maka data distribusi tidak normal (Imam Ghozali, 2006).

2. Analisis statistik

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan, oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non parametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S). Perumusan hipotesis untuk uji normalitas adalah sebagai berikut :

H_0 : data residual berdistribusi normal

H_a : data residual tidak berdistribusi normal

Kriteria keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut :

Jika $\text{sig.} \leq 0,05$, maka H_0 ditolak

Jika $\text{sig.} > 0,05$, maka H_0 diterima

3.6.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2006).

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik scatterplot dan uji Glejser. Uji grafik dilakukan dengan membaca pola scatterplot. Apabila titik-titik membentuk pola tertentu pada scatterplot, maka dapat disimpulkan terdapat heteroskedastisitas dan model regresi harus diperbaiki.

3.6.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent (Imam Ghazali, 2006). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam regresi dalam penelitian ini dengan melihat :

- i. *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Operasional setiap variabel independent menjadi variabel dependen dan diregresi terhadap variabel independen lainnya (Ghozali, 2006).

3.7. Uji kebaikan Model

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fitnya*. Tujuan dari uji kebaikan model ini adalah untuk menentukan seberapa baik model yang digunakan cocok untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, dan nilai statistik F (Imam Ghazali, 2006).

3.7.1. Koefisien Determinasi (*adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghazali, 2006).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 akan meningkat, tidak

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R*² pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti *R*², nilai *Adjusted R*² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Imam Ghazali, 2006). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R*² untuk mengevaluasi model regresi penelitian.

3.7.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Imam Ghazali, 2006). Uji F untuk menguji kebaikan model regresi (*goodness of fit*) yang digunakan maksudnya untuk menguji seberapa baik data sample penelitian *fit* dengan model regresi yang diajukan dalam penelitian. Jika model regresi cukup *fit* berarti pengujian dapat dilanjutkan ke tahap uji statistik t (Imam Ghazali, 2006).

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ($\alpha=0.05$), dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Apabila taraf signifikansi observasi ≤ 0.05 maka hipotesis alternatif dapat diterima, artinya variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel – variabel dependen.
- b. Apabila taraf signifikansi observasi > 0.05 maka hipotesis alternatif tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel – variabel dependen.

3.7.3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Hipotesis)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta \neq 0$, berarti ada pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi alfa sama dengan 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika p value (probabilitas) \leq tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05 maka H_0 ditolak berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika p value (probabilitas) $>$ tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05; maka H_0 tidak dapat ditolak berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

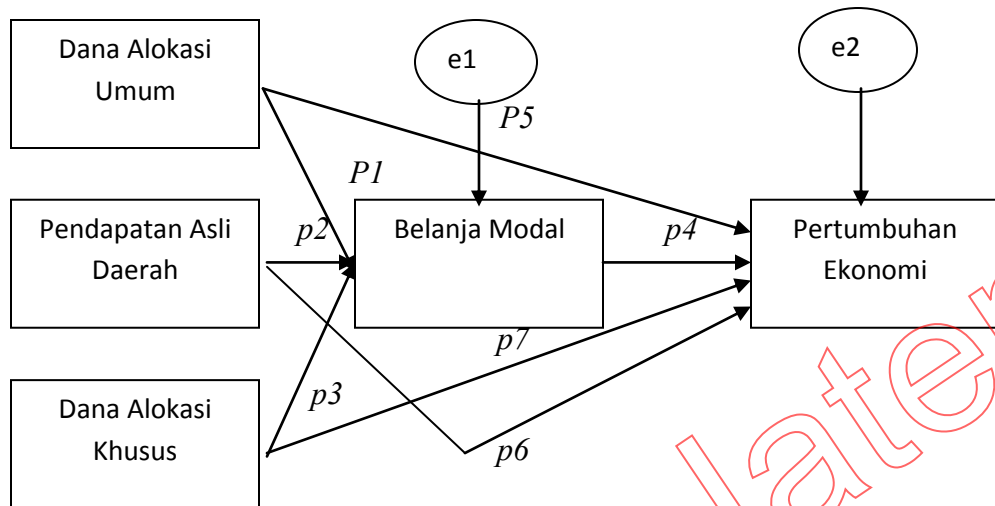
3.8. Pengujian Intervening

Analisis Jalur

Analisis Jalur (*Path Analysis*) digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. Analisis Jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda atau analisis jalur merupakan penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel dependen dengan beberapa variabel independen (Imam Ghazali, 2006). Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik (*statistic software*) yang dikenal dengan SPSS.

Berikut adalah Model Analisis Jalur (*Path Analysis*) :

Gambar 3.1
Model Analisis Jalur (*Path Analysis*)



Berdasarkan gambar 3.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) yaitu lewat variabel Belanja Modal (BM) lebih dahulu baru ke Pertumbuhan Ekonomi (PE).

Setiap nilai p menggambarkan jalur dan koefisien *path*. Nilai koefisien *path* tersebut dihitung dengan menggunakan analisis regresi. Besarnya nilai *error* dapat dicari dengan rumus sebagai berikut (Imam Ghazali, 2006) :

$$e1 = \sqrt{1 - R^2} \quad , \quad e2 = \sqrt{1 - R^2}$$

Dalam pengambilan kesimpulan dilakukan dengan *p-value* yang apabila dari masing-masing hubungan variabel dalam model regresi menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis dapat diterima. Adapun besarnya

pengaruh tidak langsung masing-masing variabel independen ke variabel dependen adalah sebagai berikut :

Pengaruh tidak langsung DAU ke BM ke PE = (p1) (p4)

Pengaruh tidak langsung PAD ke BM ke PE = (p2) (p4)

Pengaruh tidak langsung DAK ke BM ke PE = (p3) (p4)

Pengaruh langsung DAU ke PE = (p5)

Pengaruh langsung PAD ke PE = (p6)

Pengaruh langsung DAK ke PE = (p7)

Jika nilai (p1) X (p4) lebih besar dibanding nilai (p5) maka dapat disimpulkan bahwa DAU memiliki pengaruh tidak langsung terhadap PE melalui BM. Namun bila nilai (p5) lebih besar dibanding nilai (p1) X (p4) maka dapat disimpulkan bahwa DAU memiliki pengaruh langsung terhadap PE tanpa melalui BM, begitu pula dengan nilai PAD dan DAK.

STIE BPPD Jateng

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan perincian dari laporan setiap Kabupaten/Kota yang ada. Data penelitian yang digunakan adalah data mengenai Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto sebagai ukuran Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Penelitian menggunakan data tahun 2006 hingga tahun 2010 yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah dan melalui situs internet departemen keuangan dengan alamat <http://www.djpk.depkeu.go.id/>. Provinsi Jawa Tengah berdiri pada tanggal 4 juli 1950 dengan dasar hukum UU No. 70 Tahun 1950. Provinsi Jawa Tengah berada di Pulau Jawa dengan luas 33.171,88 km². Provinsi Jawa Tengah terletak pada posisi 6°-8° LS dan 108°-111° BT, dengan ibukota Semarang.

Obyek penelitian ini adalah sebanyak 35 pemerintah kabupaten / kota di Jawa Tengah dengan sampel penelitian adalah data pada tahun 2006 hingga 2010. Dengan dasar penggabungan data cross section 35 wilayah dan *time series* selama 5 tahun maka diperoleh sebanyak $35 \times 5 = 175$ data pengamatan. Daftar nama-nama pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang menjadi sampel dapat dilihat pada Lampiran A.

4.1.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan statistik dasar rata-rata, standar deviasi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	175	2.2987	6.1220	4.56	0.82
Belanja Modal	175	23660000000.00	274529979000.00	124282873377.14	39844987421.88
PAD	175	13937105000.00	149411089000.00	60014878971.43	23623347345.32
DAU	175	185429000000.0	793266735000.00	492558770457.14	132629222670.23
DAK	175	7730000000.00	100912400000.00	44704745085.71	19911417709.99
Valid N (listwise)	175				

Tabel 4.1 menunjukkan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Penjelasan dari masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut:

4.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

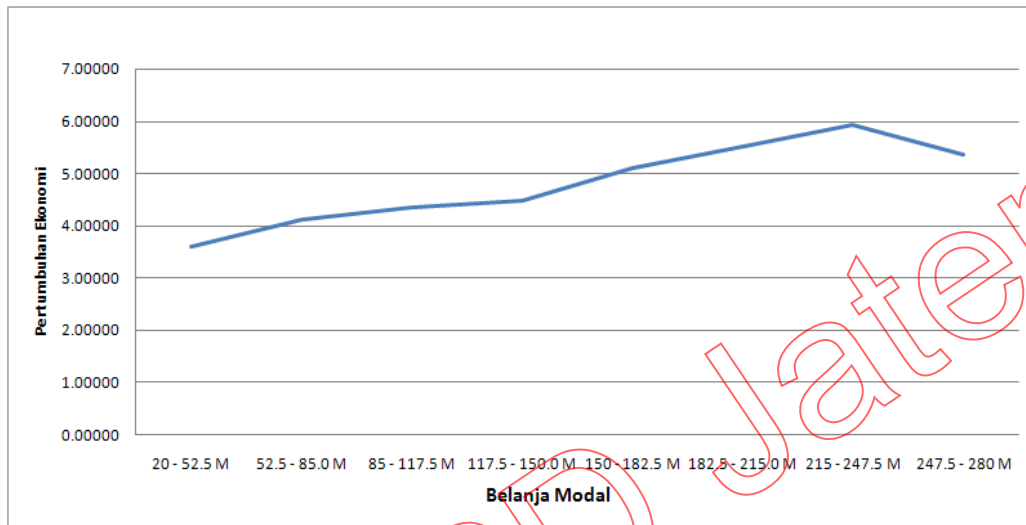
Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan menggunakan perubahan PDRB dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2006-2010 menunjukkan rata-rata sebesar 4,56 persen per tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata terjadi pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau dengan kata lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cenderung mengalami kenaikan sejak tahun 2006 – 2008. Pertumbuhan ekonomi terendah adalah sebesar 2,2987% yang terjadi di Kabupaten Klaten pada tahun 2006 dan Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sebesar 6,122% yang terjadi di Kota Magelang tahun 2010.

4.1.2.2. Belanja Modal

Rata-rata Belanja Modal pada 35 daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2006-2010 dalam rupiah menunjukkan rata-rata sebesar Rp 124.282.873.377,14 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk pembelanjaan dan perbaikan berbagai fasilitas untuk umum mencapai Rp 124.282.873.377.14 per tahun. Nilai belanja modal terendah adalah sebesar Rp 23.660.000.000 di

Kota Salatiga tahun 2007 dan nilai belanja modal tertinggi adalah sebesar Rp 274.529.979.000 di Kabupaten Wonogiri tahun 2010.

Pola yang dibentuk dari hubungan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi dari 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah selama tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1

Pola Hubungan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi

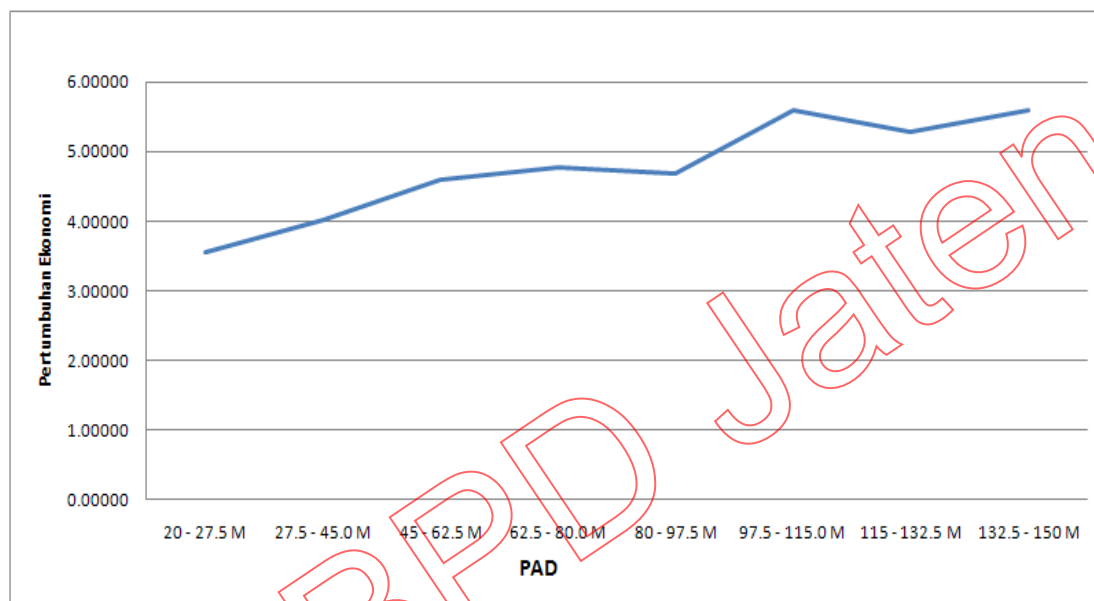
Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa kabupaten / Kota dengan Belanja Modal yang besar cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Sedikit penyimpangan yang terjadi adalah pada kondisi belanja modal yang paling besar yang tidak memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi.

4.1.2.3. Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata Pendapatan Asli Daerah di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2006-2010 menunjukkan rata-rata sebesar Rp 60014878971.43 per tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari pajak dan retribusi daerah mencapai Rp

60014878971.43 per tahun. Nilai PAD terendah adalah sebesar Rp 13937105000.00 di Kota Pekalongan tahun 2006 sedangkan nilai PAD tertinggi mencapai Rp 149411089000.00 di Kota Semarang tahun 2009.

Pola yang dibentuk dari hubungan PAD dengan belanja modal pada 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah selama tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

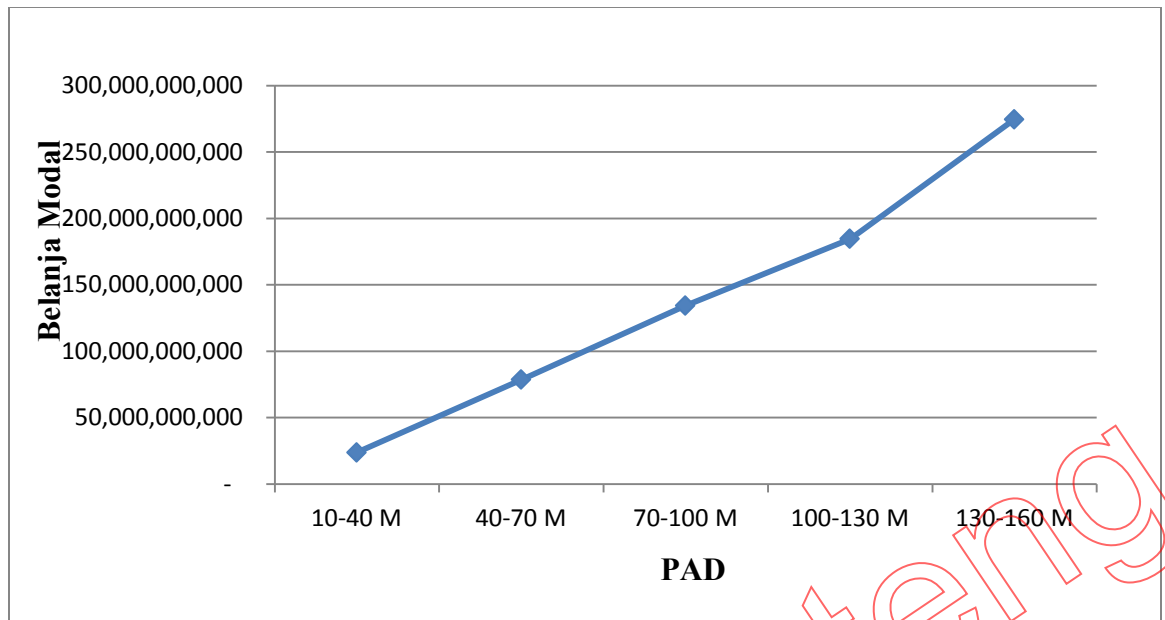


Gambar 4.2

Pola Hubungan PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa kabupaten / Kota dengan PAD yang besar cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar meskipun beberapa diantaranya ada yang mencerminkan kondisi yang sedikit lebih rendah.

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal berdasarkan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3

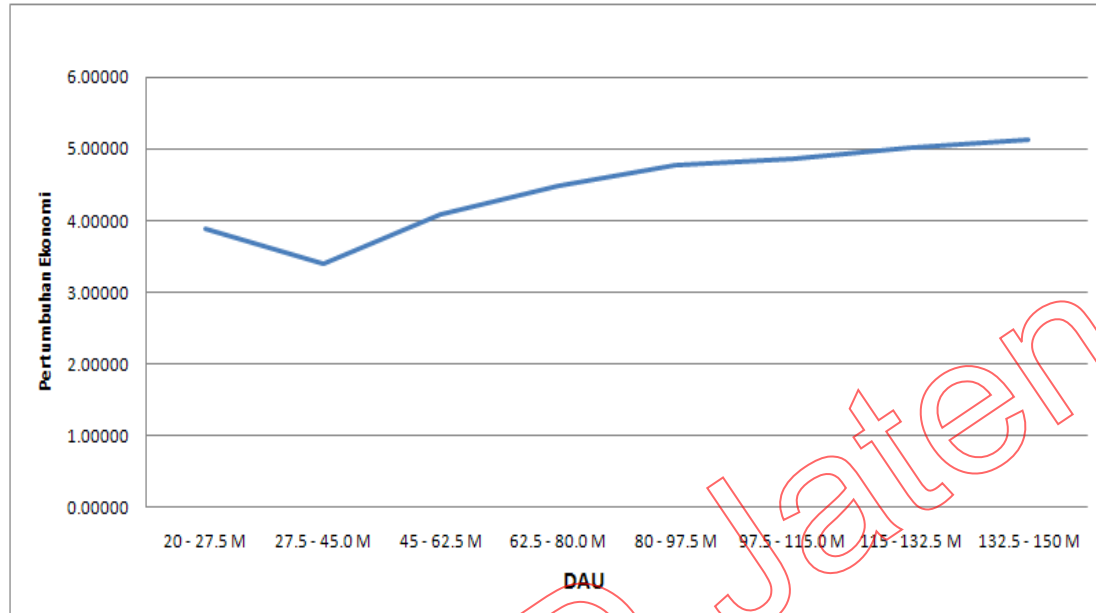
Pola Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan Pendapatan Asli Daerah yang besar cenderung memiliki Belanja Modal yang lebih besar begitu pula beberapa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang kecil maka Belanja Modalnya cenderung kecil.

4.1.2.4. Dana Alokasi Umum

Rata-rata Dana Alokasi Umum yang diperoleh 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2006-2010 menunjukkan rata-rata sebesar Rp 492558770457.14 per tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata dana alokasi umum, yang diperoleh pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat mencapai Rp 492558770457.14 per tahun. Nilai Dana Alokasi Umum terendah adalah sebesar Rp 185429000000.0 di Kota Salatiga tahun 2006 sedangkan nilai Dana Alokasi Umum tertinggi mencapai Rp 793266735000.00 di Kabupaten Cilacap pada tahun 2010.

Pola yang dibentuk dari hubungan Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

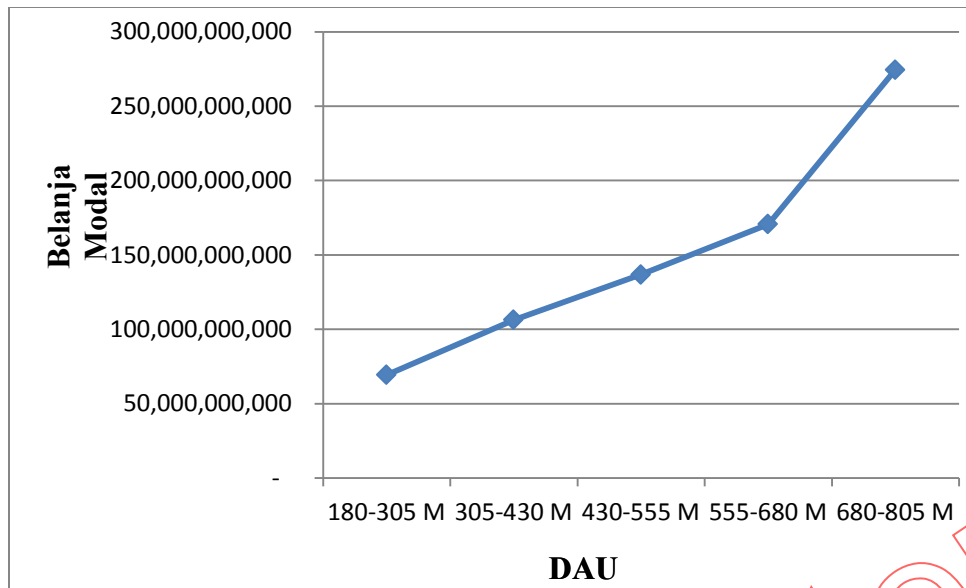


Gambar 4.4

Pola Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota dengan Dana Alokasi Umum yang besar cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar meskipun ada satu kondisi yang menyimpang.

Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal berdasarkan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.5

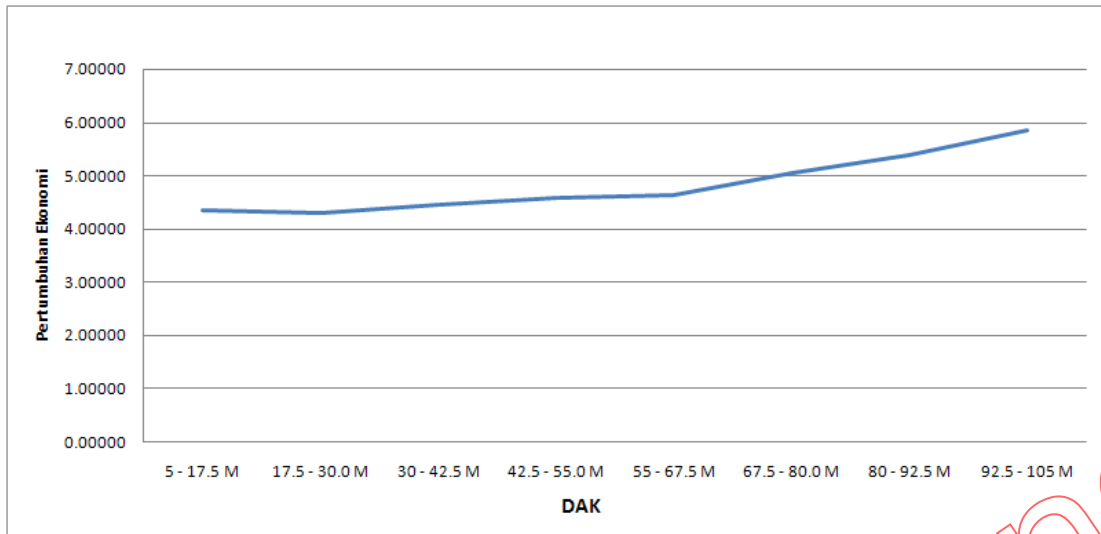
Pola Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan Dana Alokasi Umum yang cenderung mengalami kenaikan maka akan memiliki Belanja Modal yang mengalami kenaikan pula.

4.1.2.5. Dana Alokasi Khusus

Rata-rata Dana Alokasi Khusus yang diperoleh 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2006-2010 menunjukkan rata-rata sebesar Rp 44704745085.71 per tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata dana alokasi khusus, yang diperoleh pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat mencapai Rp 44704745085.71 per tahun. Nilai Dana Alokasi Umum terendah adalah sebesar Rp 7730000000.00 di Kota Tegal tahun 2006 sedangkan nilai Dana Alokasi Khusus tertinggi mencapai Rp 100912400000.00 di Kota Magelang pada tahun 2010.

Pola yang dibentuk dari hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Pertumbuhan Ekonomi pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

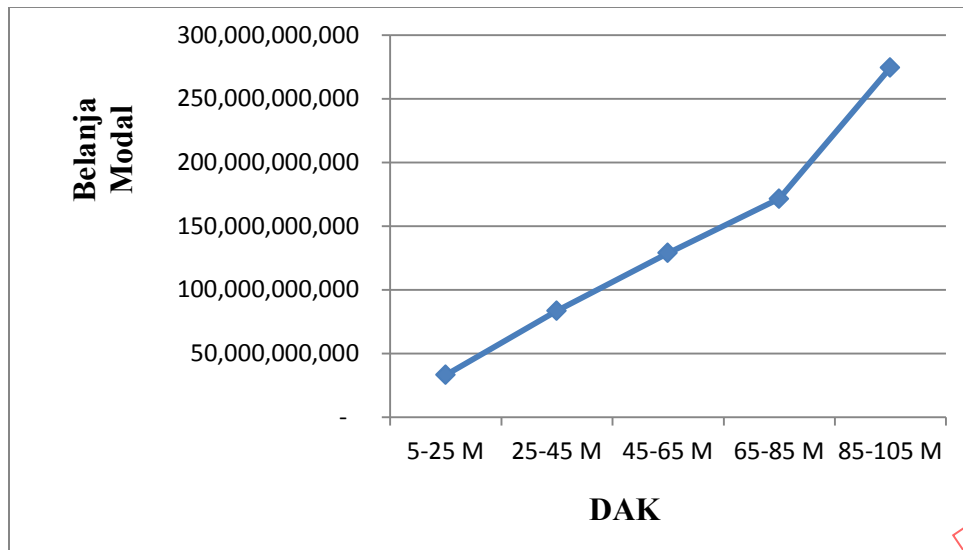


Gambar 4.6

Pola Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota dengan Dana Alokasi Khusus yang besar cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal berdasarkan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.7

Pola Hubungan Dana Alokasi Khusus Belanja Modal

Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal adanya kecenderungan kenaikan Belanja Modal pada saat Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan.

4.2. Hasil Analisis

Penelitian ini menggunakan 2 buah modal analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan model yang baik, sehingga dapat memenuhi asumsi klasik dari masing-masing model.

4.2.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, apabila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik-turunkan nilainya (Sugiyono, 2005). Koefisien regresi dihitung dengan dua

tujuan sekaligus: meminimalkan nilai penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data (Imam Ghazali, 2006). Hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.2
Model 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.953E10	9.527E9		3.100	.002
	PAD	.637	.114	.678	5.578	.000
	DAU	.089	.022	.495	4.055	.000
	DAK	.288	.128	.384	2.252	.026

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Model 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.661	.208		12.795	.000
	PAD	8.929E-12	.000	.258	3.383	.001
	DAU	1.057E-12	.000	.172	2.177	.031
	DAK	5.814E-12	.000	.142	2.108	.037
	Belanja Modal	4.663E-12	.000	.388	2.871	.005

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Model persamaan regresi linier berganda yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi bentuk standar adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = 0,678 X_1 + 0,495 X_2 + 0,384 X_3$$

$$Y_2 = 0,258 X_1 + 0,172 X_2 + 0,142 X_3 + 388 Y_1$$

Koefisien regresi linier berganda pada semua variabel bebas DAK, PAD, dan DAU maupun Belanja Modal diperoleh memiliki tanda koefisien positif.

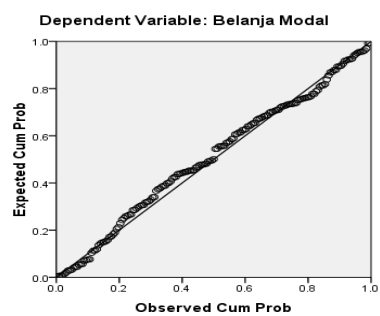
4.2.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel-variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik. Test statistik yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov test. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

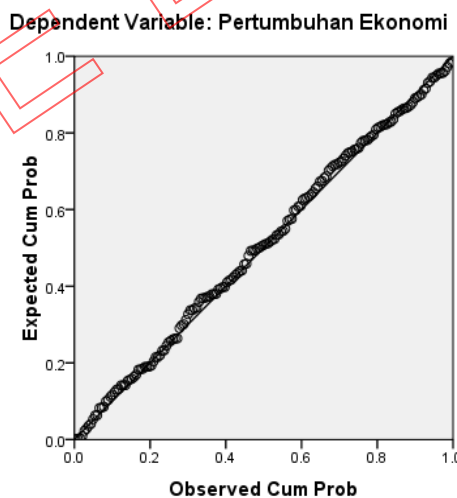
Gambar 4.8
Uji Normalitas Residual
Model 1

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Model 2

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Tabel 4.3
Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
N		175	175
Normal Parameters ^a	Mean	.0000058	.0000000
	Std. Deviation	3.07400930E10	.65110274
Most Extreme Differences	Absolute	.054	.035
	Positive	.043	.019
	Negative	-.054	-.035
Kolmogorov-Smirnov Z		.718	.467
Asymp. Sig. (2-tailed)		.681	.981

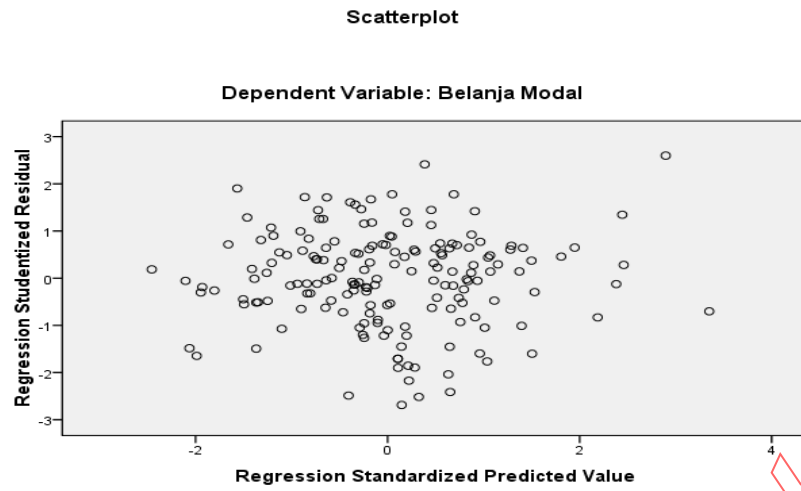
a. Test distribution is Normal.

Pengujian menggunakan kolmogorov smirnov test menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar $0,6815 > 0,05$ untuk Model 1 dan $0,981 > 0,05$ untuk model 2. Dengan demikian data dinyatakan normal dan telah memenuhi asumsi uji normalitas.

4.2.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yaitu variabel pengganggu (e_i) yang memiliki variabel yang berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya atau varian antar variabel independen tidak sama. Hal ini melanggar asumsi homoskedastisitas yaitu variabel penjelas memiliki varian yang sama (konstan). Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi digunakan metode scatter plot dan Glejser. Hasil pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut:

Gambar 4.9



Tabel 4.4

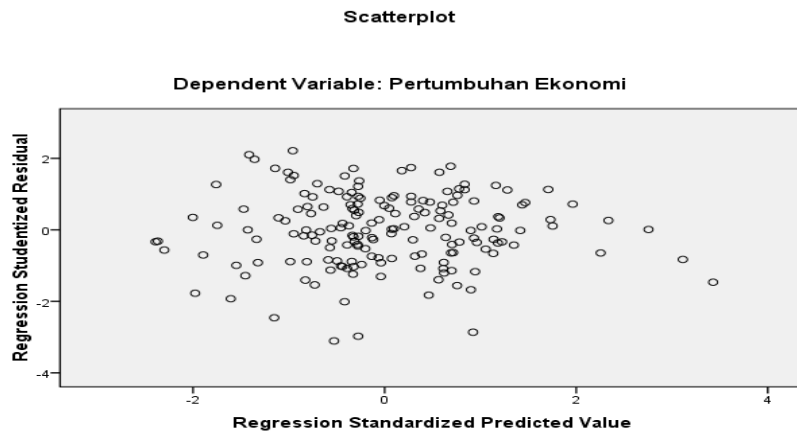
Uji Heteroskedastisitas Glejser – 1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.064E10	5.802E9		3.558	.000
	PAD	.133	.070	.165	1.911	.058
	DAU	-.018	.013	-.128	-1.377	.170
	DAK	.101	.078	.105	1.291	.199

a. Dependent Variable: AbsRes1

Gambar 4.10



Tabel 4.5
Uji Heteroskedastisitas Glejser – 2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.753	.124		6.080	.000
	PAD	4.644E-13	.000	.028	.296	.768
	DAU	-4.705E-13	.000	-.159	-1.628	.105
	DAK	-1.011E-12	.000	-.051	-.616	.539
	Belanja Modal	1.137E-13	.000	.012	.118	.907

a. Dependent Variable: AbsRes2

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji glejser menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang signifikan pada tingkat signifikan 5% sehingga dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.2.3. Uji Multikolinieritas

Pengujian terhadap gejala multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi/hubungan yang kuat antar variabel-variabel independen dalam model persamaan regresi. Adanya multikolinieritas dalam model persamaan regresi yang digunakan akan mengakibatkan ketidakpastian estimasi, sehingga mengarahkan kesimpulan yang meneriam hipotesis nol. Hal ini menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak signifikan dan standar deviasi sangat sensitive terhadap perubahan data. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan korelasi antar variabel penelitian VIF. Hasil pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Multikolinieritas

Variabel	Model 1		Model 2	
	VIF	Keterangan	VIF	Keterangan
PAD	1.319	Bebas multikolinieritas	1.559	Bebas multikolinieritas
DAU	1.517	Bebas multikolinieritas	1.663	Bebas multikolinieritas
DAK	1.175	Bebas multikolinieritas	1.210	Bebas multikolinieritas
Belanja Modal	-	-	1.680	Bebas multikolinieritas

Pengujian multikolinierits menggunakan nilai VIF menunjukkan bahwa nilai VIF semuanya lebih kecil dari 10, sehingga persamaan yang terjadi dinyatakan bebas dari multikolinieritas pada kedua model

4.2.3. Uji Kebaikan Model

4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (*adjusted R²*) untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat.

Tabel 4.7

Koefisien Detrminasi

Model 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.636 ^a	.405	.394	3.10086E10

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Model 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.603 ^a	.364	.349	.6587182

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R²*) pada model 1 diperoleh sebesar 0,394. Hal ini berarti 39,4% Belanja Modal dapat dipengaruhi oleh DAK, PAD dan DAU serta 60,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R²*) pada model 2 diperoleh sebesar 0,349. Hal ini berarti 34,9%.

Pertumbuhan Ekonomi dapat dipengaruhi oleh Belanja Modal, DAK, PAD dan DAU sedangkan 65,1% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.2.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama diuji dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.8

Hasil Uji Signifikansi Simultan

Model 1

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.118E23	3	3.727E22	38.766	.000 ^a
	Residual	1.644E23	171	9.615E20		
	Total	2.762E23	174			

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Model 2

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	42.183	4	10.546	24.304	.000 ^a
	Residual	73.765	170	.434		
	Total	115.948	174			

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik pada model 1 menunjukkan nilai F hitung = 38,766 dengan signifikansi sebesar 0,000.

Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 maka diperoleh nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa 3 variabel bebas yaitu DAK, PAD, dan DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil Perhitungan statistik pada model 2 menunjukkan nilai F hitung = 24,304 dengan signifikansi sebesar 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 maka diperoleh nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa 4 variabel bebas yaitu Belanja Modal, DAK, PAD dan DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4.2.3.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji hipotesis)

Uji statistik t dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Hasil pengujian tersebut dapat menentukan apakah hipotesis yang diajukan berhasil ditolak atau tidak dapat ditolak. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 buah model regresi linier berganda yaitu model pertama menguji pengaruh DAK, PAD dan DAU terhadap Belanja Modal. Model kedua menguji pengaruh Belanja Modal, DAK, PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil perhitungan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.9

Model 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.953E10	9.527E9		3.100	.002
	PAD	.637	.114	.678	5.578	.000
	DAU	.089	.022	.495	4.055	.000
	DAK	.288	.128	.384	2.252	.026

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Model 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.661	.208		12.795	.000
	PAD	8.929E-12	.000	.258	3.383	.001
	DAU	1.057E-12	.000	.172	2.177	.031
	DAK	5.814E-12	.000	.142	2.108	.037
	Belanja Modal	4.663E-12	.000	.388	2.871	.005

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi bentuk standar adalah sebagai berikut :

$$BM = 2,953 \times 10^{10} + 0,678 \text{ PAD} + 0,495 \text{ DAU} + 0,384 \text{ DAK}$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta diperoleh sebesar $2,953 \times 10^{10}$. Hal ini berarti bahwa apabila PAD, DAU dan DAK sama dengan nol maka nilai Belanja Modal akan konstan sebesar Rp $2,953 \times 10^{10}$.
- b. Koefisien variabel PAD adalah sebesar 0,678. Hal ini berarti bahwa jika PAD mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,678 rupiah, dengan asumsi bahwa variabel DAU dan DAK adalah tetap.
- c. Koefisien variabel Dana Alokasi Umum DAU adalah sebesar 0,495. Hal ini berarti bahwa jika Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,495 rupiah, dengan asumsi bahwa variabel PAD dan DAK adalah tetap.
- d. Koefisien variabel Dana Alokasi Khusus DAK adalah sebesar 0,384. Hal ini berarti bahwa jika Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,384 rupiah, dengan asumsi bahwa variabel PAD dan DAU adalah tetap.

$$PE = 2,661 + 8,929 \times 10^{-12} \text{ PAD} + 1,057 \times 10^{-12} \text{ DAU} + 5,814 \times 10^{-12} \text{ DAK} + 4,663 \times 10^{-12} \text{ BM} + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

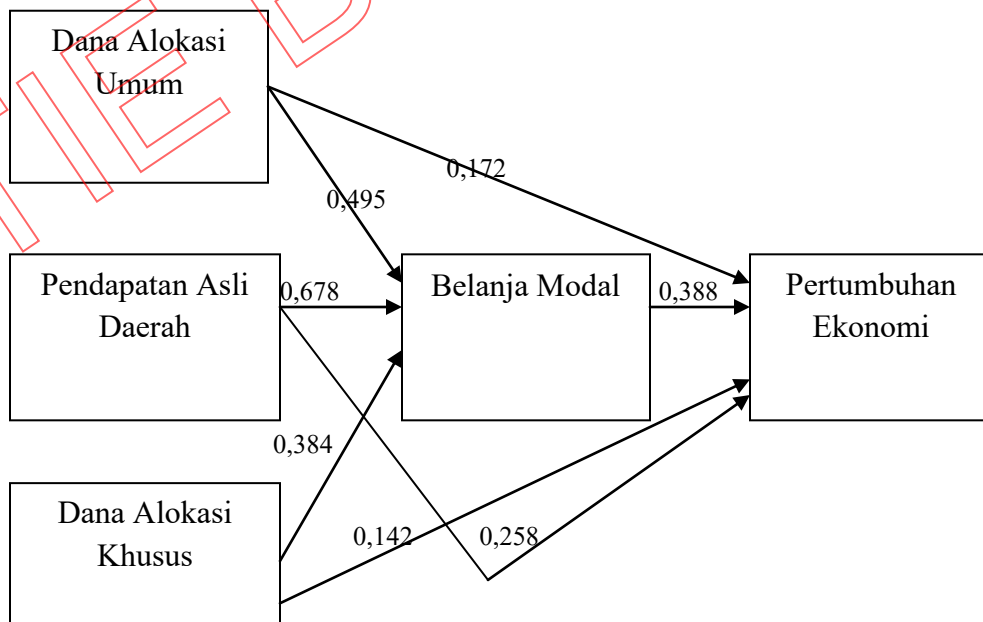
- a. Konstanta diperoleh sebesar 2,661. Hal ini berarti bahwa apabila PAD, DAU, DAK dan BM sama dengan nol maka Pertumbuhan ekonomi akan konstan sebesar 2,661.
- b. Koefisien variabel PAD adalah sebesar $8,929 \times 10^{-12}$. Hal ini berarti bahwa jika PAD mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar $8,929 \times 10^{-12}$ rupiah, dengan asumsi bahwa variabel DAU, DAK dan Belanja Modal adalah tetap.
- c. Koefisien variabel Dana Alokasi Umum DAU adalah sebesar $1,057 \times 10^{-12}$. Hal ini berarti bahwa jika Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar $1,057 \times 10^{-12}$ rupiah, dengan asumsi bahwa variabel PAD, DAU dan Belanja Modal adalah tetap.

- d. Koefisien variabel Dana Alokasi Khusus DAK adalah sebesar $5,814 \times 10^{-12}$. Hal ini berarti bahwa jika Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar $5,814 \times 10^{-12}$ rupiah, dengan asumsi bahwa variabel PAD, DAU dan Belanja Modal adalah tetap.
- e. Koefisien variabel Belanja Modal adalah sebesar $4,663 \times 10^{-12}$. Hal ini berarti bahwa jika Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar $4,663 \times 10^{-12}$ rupiah, dengan asumsi bahwa variabel PAD, DAU dan DAK adalah tetap.

4.2.4. Uji Intervening

Analisis jalur (*Path Analysis*) digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. Analisis Jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda atau analisis jalur merupakan penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel dependen dengan beberapa variabel independen (Imam Ghozali, 2006). Hasilnya sebagai berikut :

Gambar 4.11



a. Pengujian intervening tahap 1

Pengujian intervening tahap 1 merupakan pengujian terhadap pengaruh tidak langsung dari Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal. Hasil pengujian dirinci sebagai berikut :

- Pengaruh langsung Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi = 0,172
- Pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi = 0,495
Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi = 0,388
Pengaruh tidak langsung = $0,495 \times 0,388 = 0,192$

Diperoleh bahwa pengaruh tidak langsung dari Dana Alokasi Umum sebesar 0,192 lebih besar dibanding pengaruh langsungnya sebesar 0,172. Dengan demikian terdapat hubungan tidak langsung antara Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

b. Pengujian intervening tahap 2

Pengujian intervening tahap 2 merupakan pengujian terhadap pengaruh tidak langsung dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal. Hasil pengujian dirinci sebagai berikut :

- Pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi = 0,258
- Pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi = 0,678
Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi = 0,388
Pengaruh tidak langsung = $0,678 \times 0,388 = 0,263$

Diperoleh bahwa pengaruh tidak langsung dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,263 lebih besar dibanding pengaruh langsungnya sebesar 0,258. Dengan demikian terdapat hubungan tidak langsung antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

c. Pengujian intervening tahap 3

Pengujian intervening tahap 3 merupakan pengujian terhadap pengaruh tidak langsung dari Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal. Hasil pengujian dirinci sebagai berikut :

- Pengaruh langsung Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi = 0,142
- Pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi = 0,384
Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi = 0,388
Pengaruh tidak langsung = $0,384 \times 0,388 = 0,148$

Diperoleh bahwa pengaruh tidak langsung dari Dana Alokasi Khusus sebesar 0,148 lebih besar dibanding pengaruh langsungnya sebesar 0,142. Dengan demikian terdapat hubungan tidak langsung antara Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

4.3. Pembahasan

Dengan melihat tabel 4.9, maka dapat diketahui hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil bahwa beta pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah sebesar 0,495 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) sebesar 0,05. Selanjutnya berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil bahwa beta pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0,388 dengan signifikansi sebesar 0,005 nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 yang berarti H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal adalah signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal pada

pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Dana Alokasi umum yang tinggi akan mengalokasikan belanja modal yang tinggi pula sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mengalami peningkatan sejalan dengan tingginya belanja modal untuk pembangunan daerah. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Dana alokasi umum yang rendah akan mengalokasikan Belanja Modal yang rendah untuk pembangunan daerah.

Dana alokasi umum berasal dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Semakin besar Dana alokasi umum yang semakin besar yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka kontrol terhadap penggunaan dan alokasi dana tersebut juga akan semakin besar dilakukan selain kontrol dari pemerintah daerah juga dilakukan pula kontrol dari pemerintah pusat. Adanya kontrol yang semakin besar tersebut menjadikan penggunaan dana perimbangan juga akan semakin besar untuk dialokasikan untuk pelayanan umum dan perbaikan dan peningkatan infrastruktur daerah.

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil bahwa beta pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah sebesar 0,678 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) sebesar 0,05. Selanjutnya berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil bahwa beta pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0,388 dengan signifikansi

sebesar 0,005 nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 yang berarti H2 diterima.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa daerah Kabupaten/Kota yang memiliki PAD yang tinggi akan mengalokasikan Belanja Modal yang tinggi pula, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mengalami peningkatan seiring dengan tingginya belanja modal untuk pembangunan daerah. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang memiliki PAD yang rendah akan mengalokasikan Belanja Modal yang rendah untuk pembangunan daerah.

Desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, dimana pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan kemampuan sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Di sisi lain kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan alokasi dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Di sisi lain, wilayah dengan PAD yang tinggi dapat memiliki tuntutan yang besar dari masyarakatnya untuk semakin dapat memperoleh akses yang besar terhadap pendapatan daerah tersebut. Masyarakat akan semakin banyak yang menyuarakan pada tuntutan perbaikan pelayanan umum. Kondisi demikian dapat mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk menyikapinya sebagai sebuah tuntutan atas pengembalian pendapatan daerah kepada masyarakat sehingga alokasi Belanja Modal semakin besar.

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil bahwa beta pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah sebesar 0,384 dengan nilai signifikansi

sebesar 0,026 nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) sebesar 0,05. Selanjutnya berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil bahwa beta pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0,388 dengan signifikansi sebesar 0,005 nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 yang berarti H3 diterima.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut diperoleh bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Dana Alokasi khusus yang tinggi akan mengalokasikan belanja modal yang tinggi pula, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mengalami peningkatan seiring dengan tingginya belanja modal untuk pembangunan daerah. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Dana alokasi khusus yang rendah akan mengalokasikan Belanja Modal yang rendah untuk pembangunan daerah.

Dana alokasi khusus juga berasal dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Semakin besar Dana alokasi khusus yang semakin besar yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka kontrol terhadap penggunaan dan alokasi dana tersebut juga akan semakin besar dilakukan selain kontrol dari pemerintah daerah juga dilakukan pula kontrol dari pemerintah pusat. Adanya kontrol yang semakin besar tersebut menjadikan penggunaan dana perimbangan juga akan semakin besar

untuk dialokasikan untuk pelayanan khusus dan perbaikan dan peningkatan infrastruktur daerah.

H4 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t sebesar 2,871 dengan signifikansi sebesar 0,005. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H4 diterima. Hasil penelitian mendapatkan bahwa Belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan PDRB pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Wong (2004), Kuncoro (2004), Priyo Hari Adi (2006) dan David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007). Hal ini disebabkan bahwa daerah Kabupaten/Kota yang mengalokasikan Belanja Modal yang tinggi akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang mengalokasikan Belanja Modal yang rendah untuk pembangunan daerah akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dimaksudkan untuk memberikan dampak yang sangat berarti bagi Pertumbuhan Ekonomi daerah. Dengan desentralisasi fiskal yang diundangkan maka daerah dengan PDRB yang besar akan memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan dan menentukan sendiri kebutuhan untuk daerah tersebut.

PDRB atau Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita. Umumnya Pertumbuhan Ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah (PDRB). Dengan demikian daerah dengan PDRB yang tinggi dalam satu periode menunjukkan bahwa lokasi tersebut memiliki banyak aktivitas yang menunjang pendapatan daerah seperti misalnya di sektor industri maupun jasa maupun pelayanan publik. Namun demikian infrastruktur yang ada dan menunjang pertumbuhan juga akan mengalami kerusakan. Daerah yang berorientasi pada kelanjutan untuk mendapatkan PDRB yang tinggi akan mempertimbangkan untuk selalu menjaga dan memelihara serta meningkatkan infrastruktur daerahnya.

Dengan pertimbangan tersebut maka daerah akan mengalokasikan anggaran belanja yang lebih besar untuk Belanja Modalnya untuk pembangunan daerah. Hasil ini mendukung dugaan bahwa pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publiknya.

STIE BPD Jateng

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa masih adanya peran dana perimbangan dalam hal ini DAU dan DAK yang lebih mendominasi sebagai sumber dana pemerintah daerah daripada PAD dalam melangsungkan kegiatan. Hal ini ditunjukkan dengan grafik DAU dan DAK yang cenderung semakin meningkat daripada grafik PAD dalam memenuhi Belanja Modal untuk pembangunan daerah.
2. Terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal Jawa Tengah, hal ini didukung dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Dana Alokasi Umum yang tinggi akan mengalokasikan Belanja Modal untuk pembangunan daerah yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Dana Alokasi Umum yang rendah akan mengalokasikan Belanja Modal untuk pembangunan daerah yang rendah yang pada akhirnya berdampak pada tingkat Pertumbuhan Ekonomi.
3. Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal Jawa Tengah, hal ini didukung dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki PAD yang tinggi akan mengalokasikan Belanja Modal untuk pembangunan daerah yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang memiliki PAD yang rendah akan mengalokasikan Belanja Modal untuk pembangunan daerah yang rendah yang pada akhirnya berdampak pada tingkat Pertumbuhan Ekonomi.
4. Terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal Jawa Tengah, hal ini didukung dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus yang tinggi akan mengalokasikan Belanja Modal untuk pembangunan daerah yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, daerah

Kabupaten/Kota yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus yang rendah akan mengalokasikan Belanja Modal untuk pembangunan daerah yang rendah yang pada akhirnya berdampak pada tingkat Pertumbuhan Ekonomi.

5. Terdapat pengaruh positif Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini didukung dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Daerah Kabupateb/Kota yang mengalokasikan Belanja Modal untuk pembangunan daerah akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang mengalokasikan Belanja Modal untuk pembangunan daerah yang rendah akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan diantaranya :

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang Nilai *Adjusted R-Square* untuk model tahap kedua dalam penelitian ini hanya sebesar 0,349. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal (BM), dalam ketepatan memprediksi variasi variabel Pertumbuhan Ekonomi 34,9% sedangkan sisanya sebesar 65,1% (100% - 34,9%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan dari hasil penelitian ini, maka saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut .:

Penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan menambah variabel kontrol untuk memprediksi pengaruh DAU, PAD dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

5.4. Implikasi Manajerial

Berikut beberapa implikasi manajerial dalam penelitian ini :

1. Pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Potensi yang perlu dioptimalkan tersebut terutama potensi yang dapat menarik investasi, sehingga peningkatan pendapatan asli daerah dapat menutupi akan kebutuhan daerah tersebut tanpa bergantung secara total akan bantuan dari pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah perlu mengawasi akan penggunaan dana belanja modal yang mana dari penggunaan tersebut akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga berapapun besarnya belanja modal yang dikeluarkan harus diimbangi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

STIE BPD Jateng

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2005. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih. Bapekki Depkeu.
- Abrar, Muhammad. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Vol.9.No.1): 79-88. Aceh.
- Adi, Wijaya. 2005. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah di Era Otonomi Daerah. Laporan Penelitian LIPI.
- Andrea, Christy Fhino dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *The 3rd National Conference UKWMS*. Surabaya.
- Apriana, Dina dan Rudy Suryanto. 2010. Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* (Vol.XI.No.1):64-73. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badrudin, Rudy. 2009. Dampak Kegiatan Investasi Terhadap Pendapatan Per Kapita Masyarakat Kabupaten Sleman Pasca Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Vol.3.No.2):107-117. Yogyakarta.
- Bagus, Suryono Wiratno. 2008. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Baihaqi dan Husnul Khotimah. 2009. Hubungan Belanja Modal Pemeliharaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota (studi kasus di wilayah Sumatra Bagian Selatan). *JMK* (Vol.7.No.3). Sumatra Selatan.
- Bambang Prakosa, Kesit. 2004. Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI* Vol.8 No.2, 101-118.
- Bland, Robert dan Samuel Nunn. 1992. *The impact of Capital Spending on Municipal Operating Budgets, Public Budgeting and Finance (Summer)*: 32-47.
- Brata. 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Darwanto dan Yulia Yutikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Dewi, Adha. 2006. Kajian Penerapan Akuntansi Biaya Pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. Analisis Varian Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Disertasi S3. Tidak Dipublikasikan. Msi-FE UGM. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.

- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2001. Anggaran daerah dan “*fiscal stress*” (sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 16(4): 346-357. Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi IV*. Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *jurnal akuntansi pemerintah*. (Vol.2, No.1): 53-64. Yogyakarta.
- Hari, Adi Priyo. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota SeJawa Bali). *Jurnal Studi Pembangunan KRITIS*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Hari, Adi Priyo. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (studi pada kabupaten dan kota se-Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Hendriksen dan Van Breda. 2002. *Teori Akunting*, Buku 2. Interaksa. Jakarta.
- Holtz-Eakin, et al. 1994. *Intertemporal Analysis of State An Local Government Spending: Theory and Tests*. *Journal of Urban Economics* 35: 159-174.
<http://www.djpk.depkeu.go.id/>.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta
- Irine. 2002. Pengaruh Investasi PMA terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja, serta Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Kuncoro. 2000. *Ekonomi Pembangunan. Teori, Masalah, dan Kebijakan*. YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Kuncoro. 2007. Fenomena *Flypaper Effect* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Lin dan Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago*. Vol. 49. Hal: 1-21.
- Maimunah, Mutiara dan Rusdi Akbar. 2008. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di pulau Sumatra. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* (Vol.11.No.1):37-51.
- Majidi. 1997. Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah. *Prisma*. LP3ES. Vol.3. Hal : 3-22.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Makalah. Disampaikan dalam seminar pendalaman ekonomi rakyat.

- Nanga. 2005. Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT: Adakah Posisi Fiskal Lebih Baik. *Jurnal Studi Pembangunan KRITIS*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Oates. 1995. *Comment on "Conflict and Dilemmas of Decentralization" by Rudolf Holmes*. *The World Bank Research Observer*. Hal: 351-353.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 15.
- _____ Nomor 13 tahun 2006 tentang Struktur APBD pasal 22.
- _____ Nomor 13 tahun 2006 tentang Struktur APBD.
- _____ Nomor 26 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur mengenai Belanja Modal.
- _____ Nomor 55 tahun 2005 tentang Alokasi Dasar Dana Alokasi Umum.
- _____ Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 26.
- Pujiati, Amin. 2008. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *jurnal ekonomi pembangunan: kajian ekonomi Negara berkembang*. (Hal:61-79).
- Rimbun, Singa dan Sofian Effendi. 1998. "Metode Penelitian Survey". LP3ES. Jakarta.
- Rinawaty, Taaha Yulian, Nursini dan Agussalim. 2010. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah.
- Saputra, Andra Eka, Ade Fatma Lubis dan Idhar Yahya. 2008. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Tenggara. *MEPA (Vol.3.No.2):87-99*. Aceh Tenggara.
- Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Saragih. 2005. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sidik et.al. 2002. *Dana Alokasi Umum Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Buku Kompas. Jakarta.
- Situngkir, Anggiat dan John Sihar Manurung. 2009. Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum, dan Dana Khusus Pada Belanja Modal Di Kota dan Kabupaten Sumatra Utara. *Sumatra Utara. Kajian Akuntansi*, (Vol 4, No.2):93-103. Sumatra Utara.
- Sobandi, Baban dan Said Fadhil. 2004. *Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Wilayah Kalimantan*. PKP2A III LAN. Kalimantan.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. LPFE UI dengan Bina Grafika. Jakarta.

- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Susilo dan Priyo Hari Adi. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.
- Syaiful. 2008. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Tambunan. 2006. *Upaya – Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*. www.kardin-indonesia.or.id
- Todaro. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Alih Bahasa Indonesia: Burhanudin Abdullah dan Harris Munandar.
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17 dan pasal 18.
- _____ Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____ Nomor 28 Tahun 2009 pasal 108 tentang Jenis Pajak dan Retribusi Daerah.
- _____ Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____ Nomor 33 Tahun 2004 pasal 7 tentang larangan dalam peningkatan PAD.
- _____ Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan.
- _____ Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Usman, dkk. 2008. *Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)*. lembaga penelitian SMERU.
- Wong. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. Hal: 413-423.

LAMPIRAN

STIE BPPD Jateng

LAMPIRAN A : SAMPEL PENELITIAN

NO	DAERAH
1	Kab. Banjarnegara
2	Kab. Banyumas
3	Kab. Batang
4	Kab. Blora
5	Kab. Boyolali
6	Kab. Brebes
7	Kab. Cilacap
8	Kab. Demak
9	Kab. Grobogan
10	Kab. Jepara
11	Kab. Karanganyar
12	Kab. Kebumen
13	Kab. Kendal
14	Kab. Klaten
15	Kab. Kudus
16	Kab. Magelang
17	Kab. Pati
18	Kab. Pekalongan
19	Kab. Pemasang
20	Kab. Purbalingga
21	Kab. Purworejo
22	Kab. Rembang
23	Kab. Semarang
24	Kab. Sragen
25	Kab. Sukoharjo
26	Kab. Tegal
27	Kab. Temanggung
28	Kab. Wonogiri
29	Kab. Wonosobo
30	Kota Magelang
31	Kota Pekalongan
32	Kota Salatiga
33	Kota Semarang
34	Kota Surakarta
35	Kota Tegal

LAMPIRAN B : DANA ALOKASI UMUM

NO	DAERAH	Dana Alokasi Umum				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Banjarnegara	422509000000	452544000000	488707563000	504765000000	500783177000
2	Kab. Banyumas	603887000000	654154000000	702152351000	735160880000	720191173000
3	Kab. Batang	333434000000	362659000000	401574876000	416413440000	414499766000
4	Kab. Blora	410074000000	447775000000	478260120000	487316394000	487917464000
5	Kab. Boyolali	492181000000	528784000000	582512206000	586021039000	587574192000
6	Kab. Brebes	609597000000	657982000000	716426000000	716602860000	738270368000
7	Kab. Cilacap	661263000000	671263000000	773078652000	782157000000	793266735000
8	Kab. Demak	408453000000	438288000000	483239311000	484814489000	493497333000
9	Kab. Grobogan	512838000000	563699000000	615030004000	614891166000	617827183000
10	Kab. Jepara	403190000000	461230000000	505641495000	522070110000	529580873000
11	Kab. Karanganyar	421432000000	459156000000	506156445000	517670406000	520919106000
12	Kab. Kebumen	536688000000	585365000000	616395049000	638804310000	642797600000
13	Kab. Kendal	409296000000	453755000000	490895234000	512809060000	520676886000
14	Kab. Klaten	635488000000	694207000000	744676781000	726192262000	726234465000
15	Kab. Kudus	359184000000	421953000000	460540680000	471869492000	463012580000
16	Kab. Magelang	502945000000	548521000000	588001786000	596437825000	260112799000
17	Kab. Pati	509573000000	559748000000	603264393000	621169150000	620576636000
18	Kab. Pekalongan	377379000000	411159000000	465324091000	475256250000	490093078000
19	Kab. Pemasang	491281990000	530443000000	577864687000	577864687000	619895592000
20	Kab. Purbalingga	383925000000	416181000000	458204824000	462110000000	464789000000
21	Kab. Purworejo	432013000000	471735000000	515796414000	526630040000	528061281000
22	Kab. Rembang	342777000000	361876000000	398410703000	407158671000	411434996000
23	Kab. Semarang	412468000000	455990000000	491166076000	508704917000	508915019000
24	Kab. Sragen	466851000000	513575000000	551265965000	551913436000	561675090000

25	Kab. Sukoharjo	421438000000	460662000000	498935688000	509732760000	516588000000
26	Kab. Tegal	510554990000	550407000000	606452130000	624991570000	640042082000
27	Kab. Temanggung	357822000000	389124000000	421056329000	430276350000	438090923000
28	Kab. Wonogiri	523439000000	556870000000	598932854000	614599465000	616996009000
29	Kab. Wonosobo	359723000000	389517980000	427667185000	431742990000	442370077000
30	Kota Magelang	216062000000	235917000000	256525338000	256733670000	604521811000
31	Kota Pekalongan	209651000000	235899000000	264051790000	265366270000	490093078000
32	Kota Salatiga	185429000000	212614000000	225384715000	236695720000	238069009000
33	Kota Semarang	513812000000	586736000000	634864459000	687629207000	640186272000
34	Kota Surakarta	334287000000	374501000000	420911721000	435470810000	428248927000
35	Kota Tegal	189007000000	220303000000	236194340000	241785257000	640042082000

LAMPIRAN C : PENDAPATAN ASLI DAERAH

NO	DAERAH	Pendapatan Asli Daerah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Banjarnegara	71083434000	36524489000	46528340000	49599390000	60036077000
2	Kab. Banyumas	84391270000	83304970000	107425765000	101413858000	65364093000
3	Kab. Batang	31030140000	25613626000	41192714000	36517563000	44570205000
4	Kab. Blora	36637785000	30732453000	50203193000	50000000000	56500000000
5	Kab. Boyolali	59307283000	43201052000	63733408000	62787013000	80020241000
6	Kab. Brebes	47995353000	34121314000	71896767000	65081383000	70466896000
7	Kab. Cilacap	78895457000	63269551000	102780342000	100784000000	126058245000
8	Kab. Demak	33811888000	29902617000	43817065000	41865674000	54560293000
9	Kab. Grobogan	41921570000	43687689000	59922461000	45890617000	56175738000
10	Kab. Jepara	54110690000	53900233000	70427234000	72717676000	71081298000
11	Kab. Karanganyar	46052120000	48716331000	64470676000	64017107000	73976841000
12	Kab. Kebumen	92533197000	50751508000	58599425000	61130149000	67981056000
13	Kab. Kendal	63330009000	52393853000	71684588000	62627065000	75773781000
14	Kab. Klaten	33920000000	40775724000	49549622000	66073046000	71371000000

15	Kab. Kudus	51311620000	52726631000	71520068000	71404840000	92294396000
16	Kab. Magelang	62226400000	60387568000	81203386000	69554510000	50085652000
17	Kab. Pati	66128698000	55575776000	80677766000	70623590000	92113750000
18	Kab. Pekalongan	30803316000	37117857000	50136941000	48132168000	55967925000
19	Kab. Pemalang	59457261000	45047420000	66737480000	53658695000	61498796000
20	Kab. Purbalingga	47694606000	43770000000	63795293000	68865789000	68143472000
21	Kab. Purworejo	32813869000	39899183000	51174861000	47480960000	60989102000
22	Kab. Rembang	39998290000	51049660000	51150558000	56754633000	78227428000
23	Kab. Semarang	66625755000	63803782000	82942881000	90188374000	97181797000
24	Kab. Sragen	52019760000	50590633000	65561026000	57450017000	69398245000
25	Kab. Sukoharjo	44008081000	37533328000	41898319000	45132000000	60373433000
26	Kab. Tegal	53852887000	58073801000	59370632000	67132953000	74304065000
27	Kab. Temanggung	31643817000	34986707000	37773970000	39993148000	55095179000
28	Kab. Wonogiri	47864470000	42735400000	54129295000	60942584000	64818342000
29	Kab. Wonosobo	30618482000	25533351000	38158244000	45003352000	60647867000
30	Kota Magelang	36533677000	28720025000	40549584000	49373992000	78651454000
31	Kota Pekalongan	13937105000	19195006000	30098049000	22544920000	55967925000
32	Kota Salatiga	32449466000	30424734000	45149902000	38991171000	51590175000
33	Kota Semarang	124822680000	131740209000	137914251000	149411089000	143826726000
34	Kota Surakarta	78585750000	86344700000	102929502000	106759419000	120183277000
35	Kota Tegal	63725637000	58869585000	69567244000	65268799000	74304065000

LAMPIRAN D : DANA ALOKASI KHUSUS

NO	DAERAH	Dana Alokasi Khusus				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Banjarnegara	31865000000	44339000000	58868000000	65961000000	60953553000
2	Kab. Banyumas	30250000000	10148000000	10146000000	37630000000	76326300000
3	Kab. Batang	26168238000	44628000000	55568000000	68377000000	46451400000
4	Kab. Blora	11840000000	43376000000	56700000000	52242000000	82515300000
5	Kab. Boyolali	24930000000	41000000000	54087000000	69901000000	55663700000
6	Kab. Brebes	13850000000	10334000000	10334000000	39229000000	66824200000
7	Kab. Cilacap	33430000000	61168000000	78898000000	75014000000	100844400000
8	Kab. Demak	29330000000	52117000000	63555000000	71896000000	56535200000
9	Kab. Grobogan	13020000000	10325000000	19977500000	26808000000	67472400000
10	Kab. Jepara	26080000000	48410000000	61272000000	76104000000	64454400000
11	Kab. Karanganyar	23800000000	43137000000	54898000000	68096000000	55095100000
12	Kab. Kebumen	29060000000	52203000000	66405000000	74226000000	65818900000
13	Kab. Kendal	32040000000	46741000000	59995000000	74895000000	58544700000
14	Kab. Klaten	27517927000	50867000000	62798000000	71995000000	70542300000
15	Kab. Kudus	42368600000	38218000000	47293000000	59851000000	30502200000
16	Kab. Magelang	32080000000	48654000000	48654000000	80652000000	17730100000
17	Kab. Pati	28220000000	49976000000	66068000000	75860000000	66729600000
18	Kab. Pekalongan	25910000000	46428000000	58600000000	60665000000	63845500000
19	Kab. Pemasang	27760000000	9871000000	9932300000	9871000000	61660200000
20	Kab. Purbalingga	27440000000	39606000000	51047000000	76593050000	44809000000
21	Kab. Purworejo	26540000000	44401000000	56743000000	68762000000	56527500000
22	Kab. Rembang	45910000000	41005000000	51071000000	56633000000	48878400000
23	Kab. Semarang	28340000000	45884000000	57838000000	65057000000	51310300000
24	Kab. Sragen	36055000000	44709000000	54287000000	48158000000	51644800000
25	Kab. Sukoharjo	22849000000	21610023000	50547000000	63107000000	49452900000
26	Kab. Tegal	28600000000	9880000000	28476000000	46276000000	59002900000
27	Kab. Temanggung	24629999000	39674000000	48148000000	51185000000	46794100000

28	Kab. Wonogiri	3241000000	5430600000	7062700000	7035400000	72347900000
29	Kab. Wonosobo	4589000000	4589000000	5728000000	6701900000	55332700000
30	Kota Magelang	1045000000	2292300000	2795000000	2993200000	100912400000
31	Kota Pekalongan	1751000000	2868100000	3514500000	3870500000	63845500000
32	Kota Salatiga	1854290000	2126140000	3102800000	3204400000	21182300000
33	Kota Semarang	1882000000	2850000000	2114100000	4180300000	30292200000
34	Kota Surakarta	1647000000	2653300000	3100700000	3876500000	29118400000
35	Kota Tegal	773000000	2473600000	3149900000	3787600000	24698700000

LAMPIRAN E : BELANJA MODAL

NO	DAERAH	Belanja Modal				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Banjarnegara	120934432000	118008298000	138287451000	102463952000	72453773000
2	Kab. Banyumas	143594770000	115336370000	154241121000	184008904000	77956589000
3	Kab. Batang	69358927000	115671247000	119144413000	94858839000	27887670000
4	Kab. Blora	77860691000	131884348000	141454932000	129823827000	55677718000
5	Kab. Boyolali	79088617000	111554453000	124533005000	136724606000	49357644000
6	Kab. Brebes	153148322000	190944176000	195181836000	165544493000	163444903000
7	Kab. Cilacap	246328181000	255404254000	277042484000	120851000000	118349237000
8	Kab. Demak	112509949000	155229455000	112693549000	171127146000	90283909000
9	Kab. Grobogan	117596339000	133974534000	183632379000	116559974000	84889943000
10	Kab. Jepara	145976553000	179923128000	156369601000	128008626000	77515946000
11	Kab. Karanganyar	93096715000	103093636000	149886536000	100288589000	53705709000
12	Kab. Kebumen	137117955000	242725232000	160041447000	174751552000	72453773000
13	Kab. Kendal	181264652000	132583732000	116591446000	96243411000	66394084000
14	Kab. Klaten	107520501000	148775964000	144478227000	75194885000	28722797000

15	Kab. Kudus	144929748000	118242571000	165755905000	228398616000	160783565000
16	Kab. Magelang	145170248000	135168204000	121809610000	117793994000	43936652000
17	Kab. Pati	108423883000	172431765000	162413282000	155703754000	113308329000
18	Kab. Pekalongan	74385946000	99435572000	96564162000	102119818000	74334694000
19	Kab. Pemasang	172565482000	156664560000	135099803000	81212592000	45694759000
20	Kab. Purbalingga	119786217000	102003312000	180386711000	134847923000	68333341000
21	Kab. Purworejo	63350305000	109596268000	106615079000	93299528000	72936286000
22	Kab. Rembang	93831590000	150366563000	123254537000	88623219000	63192556000
23	Kab. Semarang	113977620000	145546235000	164116607000	124183050000	66081052000
24	Kab. Sragen	164138750000	156501870000	170554065000	97170742000	54778646000
25	Kab. Sukoharjo	81409473000	96790104000	112595425000	92436727000	44902082000
26	Kab. Tegal	162361203000	173515857000	191884274000	171083434000	96233213000
27	Kab. Temanggung	94481391000	112790951000	119137750000	88563405000	84516584000
28	Kab. Wonogiri	163736200000	94500030000	144349169000	130187612000	79854156000
29	Kab. Wonosobo	121798268000	126455780000	160949520000	132165684000	35735797000
30	Kota Magelang	65749532000	69555818000	72451726000	95838701000	73497104000
31	Kota Pekalongan	67684936000	69192445000	104148893000	70555137000	74334694000
32	Kota Salatiga	26810000000	23660000000	126481274000	142756936000	73876627000
33	Kota Semarang	219212449000	193078363000	155065661000	274529979000	194957212000
34	Kota Surakarta	38106772000	152340330000	163614676000	190399019000	138197639000
35	Kota Tegal	88749534000	103552840000	94109843000	128880456000	96233213000

LAMPIRAN F : PERTUMBUHAN EKONOMI

NO	DAERAH	PERTUMBUHAN EKONOMI				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Banjarnegara	4,35%	5,01%	4,97%	5,11%	4,88%
2	Kab. Banyumas	4,48%	5,30%	5,37%	5,49%	5,77%
3	Kab. Batang	2,51%	3,67%	3,67%	3,72%	4,97%
4	Kab. Blora	3,85%	3,95%	5,62%	5,08%	5,19%
5	Kab. Boyolali	4,20%	4,09%	4,03%	5,16%	3,59%
6	Kab. Brebes	4,71%	4,79%	4,81%	4,99%	4,94%
7	Kab. Cilacap	4,72%	4,87%	4,92%	5,25%	5,57%
8	Kab. Demak	4,02%	4,15%	4,11%	4,08%	4,12%
9	Kab. Grobogan	4,00%	4,37%	5,32%	5,03%	5,04%
10	Kab. Jepara	4,20%	4,74%	4,49%	5,02%	4,52%
11	Kab. Karanganyar	5,08%	5,74%	5,29%	5,54%	5,41%
12	Kab. Kebumen	4,10%	4,52%	5,80%	3,94%	4,15%
13	Kab. Kendal	3,65%	4,32%	4,23%	5,58%	5,94%
14	Kab. Klaten	2,30%	3,31%	3,92%	4,24%	1,72%
15	Kab. Kudus	2,50%	3,03%	3,92%	3,95%	4,16%
16	Kab. Magelang	5,01%	5,21%	4,15%	5,56%	4,50%
17	Kab. Pati	4,50%	5,19%	4,94%	4,69%	5,11%
18	Kab. Pekalongan	4,21%	4,59%	4,78%	4,30%	4,26%
19	Kab. Pemasang	3,72%	4,47%	4,99%	4,78%	4,63%
20	Kab. Purbalingga	5,05%	6,19%	5,30%	5,89%	5,67%
21	Kab. Purworejo	5,23%	6,08%	5,61%	4,96%	5,01%
22	Kab. Rembang	5,53%	3,81%	4,67%	4,46%	4,45%
23	Kab. Semarang	3,81%	4,72%	4,26%	4,37%	4,90%
24	Kab. Sragen	5,20%	5,73%	5,69%	6,01%	6,06%
25	Kab. Sukoharjo	4,53%	5,11%	4,84%	4,76%	4,65%
26	Kab. Tegal	5,21%	5,59%	5,31%	5,29%	4,83%
27	Kab. Temanggung	3,31%	4,03%	3,54%	4,09%	4,31%
28	Kab. Wonogiri	4,10%	5,07%	4,26%	4,73%	3,14%
29	Kab. Wonosobo	3,23%	3,58%	3,69%	4,02%	4,29%
30	Kota Magelang	2,44%	5,17%	5,04%	5,11%	6,12%
31	Kota Pekalongan	3,06%	3,80%	3,72%	4,78%	5,51%
32	Kota Salatiga	4,21%	5,39%	4,98%	4,48%	5,01%
33	Kota Semarang	5,71%	5,98%	5,59%	5,34%	5,87%
34	Kota Surakarta	5,42%	5,82%	5,69%	5,90%	5,93%
35	Kota Tegal	5,15%	5,21%	5,15%	5,02%	4,60%

--	--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN G : HASIL OLAH DATA

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	175	2.2987	6.1220	4.56	0.82
Belanja Modal	175	23660000000.00	274529979000.00	124282873377.14	39844987421.88
PAD	175	13937105000.00	149411089000.00	60014878971.43	23623347345.32
DAU	175	185429000000.00	793266735000.00	492558770457.14	132629222670.23
DAK	175	7730000000.00	100912400000.00	44704745085.71	19911417709.99
Valid N (listwise)	175				

STIE BPD
Jateng

ANALISIS REGRESI BERGANDA

MODEL 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.953E10	9.527E9		3.100	.002
	PAD	.637	.114	.678	5.578	.000
	DAU	.089	.022	.495	4.055	.000
	DAK	.288	.128	.384	2.252	.026

a. Dependent Variable: Belanja Modal

MODEL 2

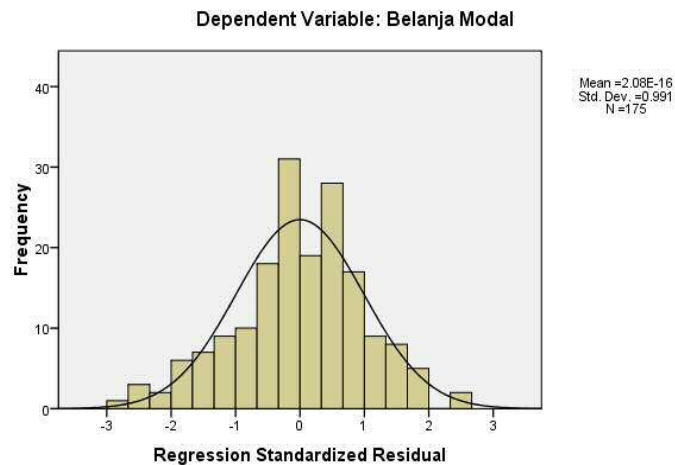
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.661	.208		12.795	.000
	PAD	8.929E-12	.000	.258	3.383	.001
	DAU	1.057E-12	.000	.172	2.177	.031
	DAK	5.814E-12	.000	.142	2.108	.037
	Belanja Modal	4.663E-12	.000	.388	2.871	.005

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

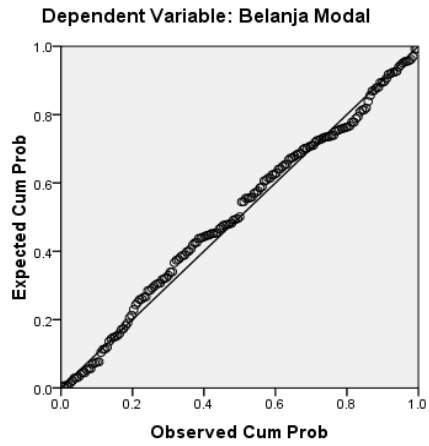
UJI NORMALITAS

MODEL 1

Histogram

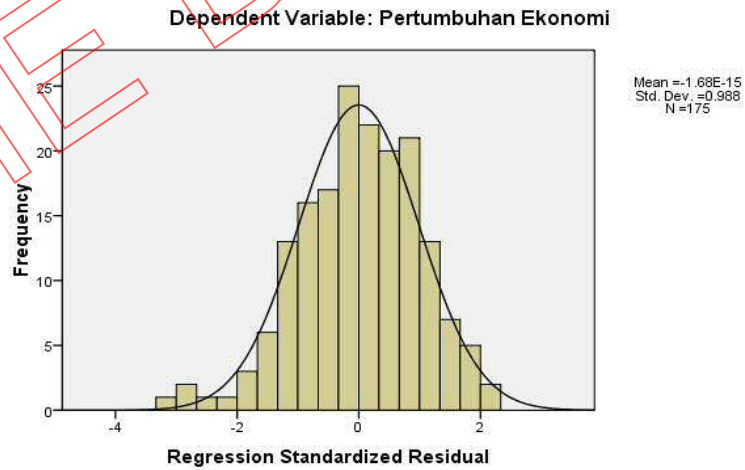


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

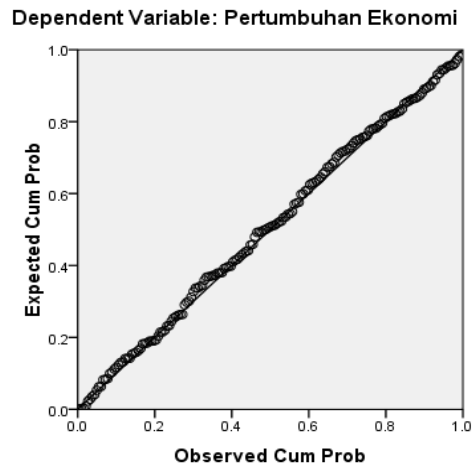


MODEL 2

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

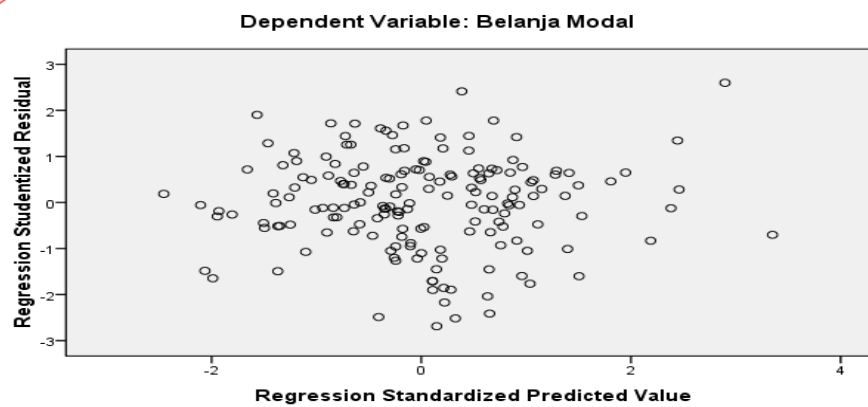


Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

Model	Nilai Kolmogorov Smirnov	Sig	Keterangan
1	0,718	0,681	Normal
2	0,467	0,981	Normal

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Scatterplot



Uji Heteroskedastisitas Glejser – 1

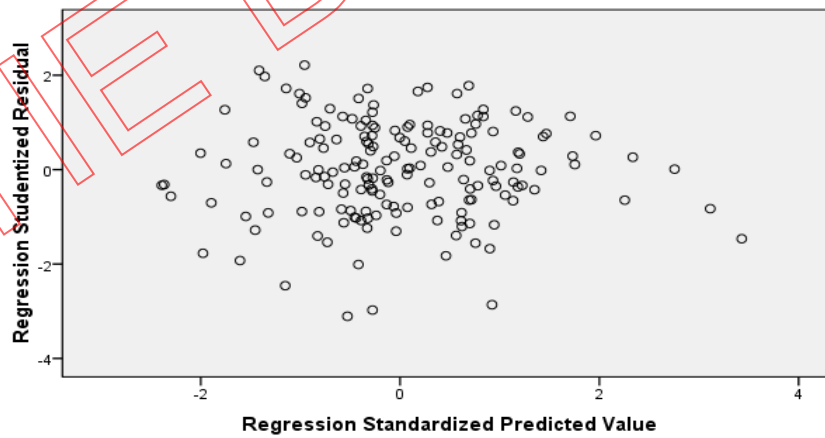
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.064E10	5.802E9		3.558	.000
	PAD	.133	.070	.165	1.911	.058
	DAU	-.018	.013	-.128	-1.377	.170
	DAK	.101	.078	.105	1.291	.199

a. Dependent Variable: AbsRes1

Scatterplot

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi



Uji Heteroskedastisitas Glejser – 2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.753	.124		6.080	.000
	PAD	4.644E-13	.000	.028	.296	.768
	DAU	-4.705E-13	.000	-.159	-1.628	.105
	DAK	-1.011E-12	.000	-.051	-.616	.539
	Belanja Modal	1.137E-13	.000	.012	.118	.907

a. Dependent Variable: AbsRes2

Uji Multikolinieritas

Variabel	Model 1		Model 2	
	VIF	Keterangan	VIF	Keterangan
PAD	1.319	Bebas multikolinieritas	1.559	Bebas multikolinieritas
DAU	1.517	Bebas multikolinieritas	1.663	Bebas multikolinieritas
DAK	1.175	Bebas multikolinieritas	1.210	Bebas multikolinieritas
Belanja Modal	-	-	1.680	Bebas multikolinieritas

UJI KEBAIKAN MODEL

Koefisien Detrminasi

Model 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.636 ^a	.405	.394	3.10086E10

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Model 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.603 ^a	.364	.349	.6587182

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

UJI SIGNIFIKANSI SIMULTAN (UJI F)

Model 1

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.118E23	3	3.727E22	38.766	.000 ^a
	Residual	1.644E23	171	9.615E20		
	Total	2.762E23	174			

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Model 2

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	42.183	4	10.546	24.304	.000 ^a
	Residual	73.765	170	.434		
	Total	115.948	174			

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER INDIVIDUAL (UJI T)

Model 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.953E10	9.527E9		3.100	.002
	PAD	.637	.114	.678	5.578	.000
	DAU	.089	.022	.495	4.055	.000
	DAK	.288	.128	.384	2.252	.026

a. Dependent Variable: Belanja Modal

STIE BPD Jateng

Model 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.661	.208		12.795	.000
	PAD	8.929E-12	.000	.258	3.383	.001
	DAU	1.057E-12	.000	.172	2.177	.031
	DAK	5.814E-12	.000	.142	2.108	.037
	Belanja Modal	4.663E-12	.000	.388	2.871	.005

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Deni Irawan

Tempat / tanggal lahir : Semarang, 20 Desember 1989.

Alamat : Jl. Kinibalu No. 23 . RT. 02 RW. 02, kel Tandang, kec
Tembalang, kota Semarang

Status : Belum Menikah

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Nomor HP : 085641788079

Pendidikan Formal

2008-2012 : STIE Bank BPD Jateng, Semarang

2005-2008 : SMA Negeri 11 Semarang

2002-2005 : SMP Negeri 39 Semarang

1996-2002 : SD Negeri Tandang Semarang